



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI  
DENGAN  
ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : IV (empat)  
Rapat Ke- : 8 (delapan)  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 4 April 2022  
Waktu : Pukul 13.30 s.d 17.40 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI  
Gedung Nusantara I (KK-IV)  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)  
Acara : Membahas Rencana dan Program Kerja Tahun 2023  
pasca Rapat Kerja tanggal 27 Maret 2023
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian  
Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI  
26 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
7 dari 11 orang Anggota
    - 1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
    - 2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
    - 3) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
    - 4) Drs. I Made Urip, M.Si.
    - 5) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.
    - 6) Vita Ervina, M.B.A.
    - 7) Maria Lestari, S.Pd.
  2. Fraksi Partai Golongan Karya  
5 dari 8 orang Anggota
    - 1) H.M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
    - 2) Firman Soebayo, S.E., M.H.
    - 3) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
    - 4) Alien Mus
    - 5) Ravindra Airlangga, M.S.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya  
4 dari 7 orang Anggota
  - 1) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
  - 2) IR. H. T. A. Khalid, M.M.
  - 3) Ir. Endro Hermono, M.B.A.
  - 4) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS, M.Sc.
  
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat  
2 dari 6 orang Anggota
  - 1) Ir. Abdullah Tuasikal
  - 2) Yessy Melania, S.E.
  
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  
1 dari 5 orang Anggota
  - 1) Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
  
6. Fraksi Partai Demokrat  
3 dari 5 orang Anggota
  - 1) Dr. Suhardi Duka, M.M.
  - 2) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
  - 3) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
  
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  
2 dari 5 orang Anggota
  - 1) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
  - 2) Dr. Hermanto, S.E., M.M.
  
8. Fraksi Partai Amanat Nasional  
2 dari 4 orang Anggota
  - 1) Haerudin, S.Ag., M.H.
  - 2) Daeng Muhammad, S.E., M.Si.
  
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  
0 dari 2 orang Anggota

B. Anggota Izin

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- 1) H. Sunarna, S.E., M.Hum.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

- 1) Dr. Azikin Solthan, M.Si.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

- 1) drh. H. Slamet

Fraksi Partai Amanat Nasional

- 1) Ir. Alimin Abdullah

### C. Pemerintah

1. Sekretaris Jenderal (Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.);
2. Inspektur Jenderal (Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H.);
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dr. Ir. Suwandi, M.Si.);
4. Direktur Jenderal Perkebunan (Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T.);
5. Direktur Jenderal Hortikultura (Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.);
6. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.);
7. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.);
8. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si.);
9. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Prof. (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr.);
10. Kepala Badan Karantina Pertanian (Ir. Bambang, M.M.).

### **Jalannya Rapat:**

#### **KETUA RAPAT (SUDIN, S.E/KETUA KOMISI IV DPR RI):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,  
Yang terhormat Saudara Sekjen dan para Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian,  
Hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat mendengarkan rapat dengar pendapat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 yang telah diputuskan dalam rapat pengganti Bamus pada tanggal 18 Januari 2023, Selasa, April 2023, Komisi IV menyelenggarakan RDP dengan Sekretaris Jenderal dan pejabat Eselon 1 Kementerian Pertanian dalam rangka membahas rencana dan program pasca rapat kerja tanggal 27 Maret yang lalu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, RDP hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(KETUK PALU 1 KALI)  
(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB)**

Rapat dengar pendapat hari ini kita mulai pada pukul 13.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 16.30 WIB. Apabila belum selesai, dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Sekjen dan para Pejabat Eselon 1,
3. Tanggapan Anggota Komisi IV,
4. Jawaban Sekjen dan para Eselon 1,
5. Kesimpulan rapat,
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

**(KETUK PALU 1 KALI)  
(RAPAT:SETUJU)**

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sejak awal, Komisi IV menyesalkan adanya kebijakan *automatic adjustment* yang selalu berulang kali dengan judul yang berbeda-beda. Inilah hebatnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada seluruh kementerian/lembaga termasuk Kementerian Pertanian. Kebijakan ini dirasa kontradiktif dengan upaya peningkatan produksi pangan di tengah ancaman krisis pangan serta perubahan iklim global. Namun demikian, pada Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 27 Maret 2023 yang lalu, Komisi IV menyetujui usulan penyesuaian *automatic adjustment* serta usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2023.

Komisi IV menganggarkan agar program dan kegiatan yang disusun fokus terukur guna meningkatkan produksi serta produktivitas komoditas pertanian di antaranya melalui pemenuhan bibit benih tanaman dan hewan yang berkualitas yang dilakukan melakukan kegiatan pendukung antara lain pengembangan pembenihan pembibitan hingga penguatan prasarana sarana pertanian antara lain irigasi, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian baik pasca maupun yang lainnya serta pupuk. Dalam rangka mendukung pengembangan pembenihan pembibitan, Komisi IV meminta kepada seluruh direktorat jenderal teknis bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis atau UPT di bawah Badan Standarisasi Instrumen Pertanian dengan melakukan beberapa kegiatan di antaranya melalui produksi dan perbanyakan benih bibit unggul hingga bimbingan teknis, sosialisasi yang anggarannya bersumber dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian dan direktur jenderal teknis. Seperti yang lalu-lalu harus ada kerja sama antara Eselon I dengan BSIP yang mana disesuaikan dengan kearifan lokal atau kebutuhan lokal, misalnya di Maluku Utara apa yang akan dikembangkan di wilayah tersebut baik itu pala, cengkeh

atau itu berarti Tupoksinya adalah Dirjen Perkebunan di sana untuk bekerja sama kepada BSIP.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi IV meminta penjelasan secara rinci, mendetil mengenai program kerja dan kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2023 pasca rapat kerja yang lalu. Kepada Kementerian Pertanian, Komisi IV meminta agar seluruh program kegiatan serta alokasi anggaran yang telah disusun dan disetujui tidak mengalami perubahan. Saya tegaskan lagi tidak mengalami perubahan. Apabila terjadi perubahan harus melalui mekanisme RDP atau rapat kerja karena ini saya lihat beberapa kali ada perubahan dari awal program ini hilang tiba-tiba, muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi ini tadi sudah saya perlihatkan kepada Sekjen.

Selain itu, Kementerian Pertanian agar mengidentifikasi seluruh lahan-lahan milik BSIP dan BPPSDMP di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber bibit benih beberapa komoditas. Saudara Sekjen agar segera menyampaikan potensi lahan yang dimaksud, selain itu agar menyampaikan beberapa lahan-lahan eksisting masing-masing UPT atau satuan kerja milik BSIP maupun BPPSDMP baik yang sudah dimanfaatkan sebagai kebun percobaan maupun sebagai pertanian komersial. Komisi IV menilai dari hasil pemantauan tersebut seharusnya PNBP yang dihasilkan untuk agar segera disampaikan hasilnya. Kita lihat contohnya di Sulawesi Selatan ada berapa Pak... ini Ali Jamil. Berapa luas di Sulawesi Selatan ini kira-kira, BSIP sama BPPSDMP-nya ada 100 hektar?

#### **DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Saya kira mungkin kalau total semua UPT kita mungkin ada, Pak, kalau total semua UPT ini karena ada paling tidak mungkin 7 UPT kita di situ, Pak, di Sulawesi Selatan ya, Pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Kan kalau dimanfaatkan untuk penambahan pembibitan, pengembangan pembibitan agar supaya apa, kalau bisa pemasok swasta jangan... Kalau kita mampu jangan pakai pemasok swasta dan saya yakin bisa dan mampu cuman kendalanya adalah contoh di beberapa wilayah, saya dapat laporan produksi yang dibuat atau pembibitan yang dibuat oleh BSIP lebih mahal daripada yang dibuat oleh swasta. *Nah*, ini tugasnya Kepala BSIP ini ya.

Demikian pengantar kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Sekjen dan para Pejabat Eselon 1 Kementerian Pertanian untuk menyampaikan secara rinci dan terukur terkait hal-hal tersebut di atas. Kami persilakan.

#### **SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan RDP pada 4 April 2023. Izinkan kami me-*refresh* kembali beberapa hal dan pasca daripada Raker 27 Maret 2023 kemarin.

Yang pertama adalah bahwa kita mengikuti apa yang sudah digariskan terkait dengan RKP 2023 kaitannya dengan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di dalam RKP tersebut ada prioritas nasional: satu, yang memfokuskan pada memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Di situ ada dua program prioritas, program prioritas tiga berkaitan dengan peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan dan program prioritas enam, peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

Dari PN 1 dan 2 program prioritas tersebut, kami rancang lima program di Kementerian Pertanian: yang pertama adalah program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, yang kedua program nilai tambah dan daya saing industri, yang ketiga program pendidikan dan pelatihan vokasi serta program dukungan manajemen. Kegiatan utama dan pendukung peningkatan produksi dan komoditas pertanian tahun 2023 sebagai berikut: Untuk tanaman pangan kami fokus pada optimalisasi peningkatan indeks pertanaman padi, perkembangan padi biofortifikasi, pengembangan kawasan jagung, pengembangan kedelai dan pengembangan *integrated farming*.

Untuk hortikultura kita fokus pada pengembangan kampung Hortikultura, pengembangan agroindustri hortikultura, pengembangan produksi benih hortikultura seperti tadi diarahkan oleh Pak Ketua dan kita semua sudah sepakat untuk pembenihan ini kita modifikasi di berbagai subsektor tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan juga peternakan, penumbuhan UMKM hortikultura serta pekarangan pangan lestari.

Terkait dengan perkebunan fokusnya adalah korporasi perkebunan rakyat rumah tangga. Yang kedua adalah produksi benih 15 juta batang dan pengembangan kawasan kopi, kelapa, jambu mete, kakao dan pinang. Tentu ada beberapa komoditas lain yang ada beberapa di wilayah akan kita juga fokuskan. Yang ketiga adalah penguatan hilirisasi dan pemasaran hasil perkebunan. Keempat, pengembangan kawasan sagu berbasis korporasi petani dan kelima percepatan swasembada gula konsumsi serta pengembangan gula non tebu di antaranya adalah stevia, aren dan kelapa.

Untuk peternakan, kita fokus pada optimalisasi reproduksi, peningkatan penanganan PMK dan penandaan ternak, pengembangan korporasi kambing dan atau domba, pengembangan sarang burung walet, pengembangan sapi potong berbasis padang penggembalaan atau *ranch* dan integrasi sapi sawit serta pengembangan desa korporasi sapi. Untuk kegiatan pendukungnya yang menyangkut masalah prasarana dan sarana pertanian yang pertama kami fokuskan pada pengembangan taksi Alsintan, optimalisasi lahan dan intensifikasi lahan dan

ekstensifikasi. Program irigasi pertanian sebagai upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, pembiayaan pertanian melalui kredit usaha rakyat, pengelolaan pupuk bersubsidi.

Yang selanjutnya, berkait dengan benih dan instrumen lainnya seperti juga yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua pengembangan logistik perbenihan dan sudah mendapatkan arahan dan sudah kita rancang di setiap UPT bekerja sama dengan dirjen teknis, Dirjen Komoditas untuk berbagai tanaman yang akan dikembangkan benihnya. Pelayanan jasa Alsintan produksi dalam negeri, pelayanan peningkatan mutu produksi pertanian, adaptasi mitigasi perubahan iklim sektor pertanian.

Kemudian sumber daya pertanian sumber daya manusia pertanian kita fokus pada penguatan kinerja penyuluh pertanian di daerah, peningkatan peran pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani dan pengembangan wirausaha muda pertanian. Perkarantina, kita fokus pada beberapa hal di antaranya adalah penguatan sistem pencegahan masuk dan tersebarnya OPTK dan HBHK. Penguatan tindakan karantina mendukung gerakan 3 kali ekspor, penguatan wilayah perbatasan, penguatan pengawasan dan penindakan, penguatan teknologi informasi dan penguatan SDM karantina.

Untuk manajemen dan pengawasan kita fokus pada penguatan reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, peningkatan peran APIP dalam audit, review, pengawalan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

Bapak Ketua, Bapak Ibu Wakil Ketua, dan  
Bapak-Ibu para Anggota Komisi IV DPR RI,  
Hadirin sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan,

Target komoditas utama tahun 2023 sebagai berikut:

- Untuk padi kita targetkan 54,5 juta ton;
- Jagung dengan kadar air 27%, kita targetkan 23,05 juta ton;
- Kedelai 370 ribu ton;
- Cabai 2,93 juta ton;
- Bawang merah 1,71 juta ton;
- Bawang putih 45,45 ribu ton;
- Kopi 810 ribu ton;
- Kakao 780 ribu ton;
- Tebu 37,15 juta ton;
- Kelapa 2,99 juta ton;
- Daging sapi kerbau 465,15 ribu ton; dan
- Daging ayam 3,87 juta ton.

Berdasarkan kesimpulan rapat di Raker 27 Maret 2023, alokasi... setelah realokasi beberapa daripada Eselon I maka komposisi daripada unit Eselon 1 terhadap pagunya adalah sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal 1,47 triliun;
- Inspektorat Jenderal 154,2 miliar;
- Dirjen Tanaman Pangan Rp2,72 triliun;

- Dirjen Hortikultura Rp1,004 triliun;
  - Dirjen Perkebunan 1,11... Rp1,12 triliun;
  - Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp2,85 triliun;
  - Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp3,09 triliun;
  - Badan Standarisasi dan Instrumen Pertanian Rp953,8 miliar;
  - Badan PPSDMP Pertanian Rp935,93 miliar;
  - Badan Karantina Pertanian Rp1,07 triliun;
- Sehingga total pagu kita Rp15,37 triliun.

Berkait dengan *automatic adjustment* juga berdasarkan kesimpulan rapat pada Raker 27 Maret kemarin sebagai berikut:

- Inspektorat Jenderal 186,47 miliar;
  - Inspektorat Jenderal Rp19,19 miliar;
  - Dirjen Tanaman Pangan Rp155,15 miliar;
  - Dirjen Hortikultura Rp15,05 miliar;
  - Dirjen Perkebunan Rp88,58 miliar;
  - Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp369,29 miliar;
  - Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp134,04 miliar;
  - Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Rp563 juta;
  - Badan PPSDMP Pertanian Rp29,31 miliar; dan
  - Badan Karantina Pertanian Rp55,41 miliar;
- Sehingga total daripada *automatic adjustment* kita Rp1,05 triliun.

Demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ketua, Bapak Ibu Wakil Ketua dan para Anggota yang kami muliakan.

Untuk selanjutnya kami mohonkan para Dirjen, Badan untuk menyampaikan masing-masing secara lebih rinci lagi. Kami persilakan izin Pak Ketua untuk Dirjen Tanaman Pangan.

#### **DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak Sekjen.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang terhormat Bapak-Ibu Pimpinan Komisi IV,  
Anggota Dewan yang terhormat, dan  
Bapak-Ibu sekalian,

Sesuai yang disampaikan Pak Sekjen setelah realokasi sebagaimana slide 5 Pak Sekjen tadi Raker, tolong *slide 2* dibuka, tolong *slide 2*.

*Nah*, kami mendapat alokasi 2,72 triliun, Bapak-Ibu. *Nah*, kegiatannya terutama untuk peningkatan produksi produktivitas pengembangan padi dengan alokasi 1,08 juta hektar dengan dana 861 miliar. Kemudian pengembangan jagung, semula 380 menjadi 390 naik 10.000 hektar dengan alokasi 362 miliar. Pengembangan kedelai menjadi 250.000 hektar, kemudian pengembangan pangan-pangan lokal lainnya 5.492 hektar.



Khusus untuk kegiatan kerja sama dengan unit BSIP dan yang lain yaitu perbanyak benih meningkat menjadi 1.356 hektar dan izin tadi sebaran spesifik lokasi yang potensi dikembangkan termasuk butir 9 itu ada IPTEK 275 ...

**KETUA RAPAT:**

Itu yang kerja sama sama BSIP berapa wilayah?

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Waktu lalu empat wilayah ini mau mengejar 10 wilayah, Bapak, sesuai...

**KETUA RAPAT:**

Kenapa empat wilayah?

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Yang realisasi yang lalu.

**KETUA RAPAT:**

Realisasinya yang lalu. Kenapa bisa realisasi yang lalu BSIP-nya *enggak* mampu?

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Iya, ada beberapa memang *enggak* siap yang ini kami...

**KETUA RAPAT:**

Itu belakang marahin saja kalau *enggak* mampu, jangan dikasih lagi sudah gitu saja.

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Siap, Pak.

Selanjutnya, izin untuk program nilai tambah Alsin pasca panen dan pengolahan 1.898 jenis dengan 4598 miliar. Kemudian angka Dukman tetap 170 miliar.

Selanjutnya, terkait dengan AA yang diblokir nilainya dari semula 100, slide *nah* betul. Semula 106 miliar menjadi 155 miliar, jadi lebih besar terutama kegiatan pengelolaan hasil dari semula 21 kena 30 miliar. Kemudian untuk aneka kacang dan umbi AKABI dari 28 ke 29 miliar. Kemudian yang sereal ini pengembangan padi, jagung dari 25 menjadi 44 miliar. Untuk sistem perbenihan dari 20 menjadi 33 miliar kemudian untuk perlindungan tanaman hama penyakit PPI dari 7 miliar menjadi 10 miliar dan untuk dukungan manajemen dari 4 M menjadi 7 M.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Target produksi jagung berapa?

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Target yang ditayangkan tadi 23,05 jagung pipilan kering kadar air 27%...

**KETUA RAPAT:**

Kira-kira bisa tercapai *enggak*?

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

*Insya Allah*, kami kejar, Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Anda ketahui *enggak* sekarang bagi beberapa wilayah itu banyak penyakit jagung itu kena bule.

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya.

**KETUA RAPAT:**

Sebagian besar di Lampung itu produksinya turun drastis. Sama juga kemarin Anda bicara masalah produksi beras sekian puluh juta ton. Anda sudah hitung belum berapa wilayah, berapa wilayah yang kebanjiran. Di Lampung itu lima kabupaten enam kabupaten yang pertama Lampung Timur, Way Kanan, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Mesuji. Kemarin lagi empat Kecamatan Kabupaten Pesawaran, belum Lampung Selatan itu potensi luasnya berapa. Jangan dihitung dari luasan. BPS mengatakan jumlahnya sekian, BPS datanya dari mana, dari dinas, Anda mengatakan Anda datanya dari mana, dari BPS. Ini kan bolak-balik saya juga bingung ini.

Lanjutkan, Pak Sekjen.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak ketua.

Pak Dirjen Horti.

**DIRJEN HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih.

Mohon izin, Pak Ketua, Pak Sekjen, Bapak-Ibu semuanya.

Lanjut, langsung saja kepada *automatic adjustment*. *History automatic adjustment* di *slide* nomor 6. Jadi mohon izin Pak Ketua, jadi RDP tanggal 24 Januari 2023, *automatic adjustment* Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp89,045 miliar *Nah*, berhubungan dengan kegiatan di Hortikultura terutama dengan komoditas strategis yang hampir setiap minggu kita rapat bersama Kementerian Dalam Negeri untuk pengendalian inflasi, kita khususnya untuk bawang merah dan cabai maka berdasarkan hasil rapat, kita untuk *automatic adjustment* pada Raker 27 Maret 2023 menjadi Rp15,045 miliar di mana yang Rp74 miliar pada tabel ini dialokasikan untuk pengembangan kawasan bawang merah dan cabai terutama di daerah-daerah defisit.

Jadi, *slide* selanjutnya, *next*. Ini untuk kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat khususnya untuk bawang merah ada 1.000 tambahan 1.300 hektar dengan dibukanya sebagian blokir tersebut sudah 74 miliar. Ada 1.300 hektar untuk pengembangan bawang merah dan 1.300 hektar juga untuk pengembangan ekstensifikasi aneka cabai dalam rangka pengendalian inflasi.

Saya kira itu yang bisa kami presentasikan, Pak karena ini memang yang berubah hanya dua komoditas itu saja dari 74 miliar dan tidak ada kegiatan perubahan penambahan-penambahan di tempat lainnya. Demikian.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Usulan saya konkret siang ini. Saya minta bantuan bibit cabai, bawang dan tomat untuk diberikan kepada misalnya sesuai dengan himbauan Kemendagri kemarin. Ada lahan-lahan kosong misalnya di kantor-kantor PKK ataupun apa itu himbauan untuk supaya harga cabai jangan melonjak. Mungkin juga nanti bisa bekerjasama sama TNI umumnya di kantor Koramil Kodim itu kan lahannya luas, kenapa *enggak* diberikan bantuan cabai maupun tomat serta yang lain-lain. Ini konkret saya katakan. Teman-teman juga nanti saya harap bisa reses nanti berkunjung melihat, tawarkan kerja sama dengan mereka agar supaya jangan terjadi gejolak harga yang luar biasa.

Itu saja, terima kasih.

Lanjutkan Sekjen.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak Ketua.

Dirjen Perkebunan silakan.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi IV DPR RI,  
Ibu dan Bapak Wakil Ketua dan Pimpinan Komisi IV DPR RI,  
Anggota Komisi IV DPR RI,  
Bapak-Bapak Sekjen Kementan,  
Pejabat Eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian, serta  
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal Perkebunan pasca rapat kerja tanggal 27 Maret 2023. *Slide 2.* Menindaklanjuti rapat kerja pada tanggal 27 Maret 2023, pagu Direktorat Jenderal Perkebunan mengalami penurunan sebesar 20,818 miliar menjadi 1,118 triliun yang terbagi menjadi dua program yaitu nilai tambah dan daya saing industri sebesar 917,318 miliar atau 82% dan dukungan manajemen sebesar 200,702 atau 18%. Apabila dibedakan menjadi jenis belanja terdapat tiga jenis yaitu belanja pegawai sebesar 87,36 miliar, 8% dari total pagu anggaran, belanja modal sebesar 188,51 miliar atau 17% dan belanja barang termasuk belanja bantuan pemerintah sebesar 842,14 miliar atau 75%.

Untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan dilakukan langkah-langkah dengan rentang waktu jangka panjang maupun jangka pendek. Peningkatan produksi dalam skema jangka panjang dilakukan dengan pengadaan logistik benih dan pengembangan kawasan melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi. Sedangkan untuk jangka pendek dapat dilakukan dengan pengembangan kawasan melalui intensifikasi, peningkatan produksi dilakukan dengan mengoptimalkan agro input dan optimalisasi lahan perkebunan.

*Slide 3 sampai 5.* Kegiatan pembangunan perkebunan bertumpu pada logistik benih dengan alokasi anggaran sebesar 437,30 miliar. Pada tahun 2023 ini akan dibangun 47 unit *nursery* yang tersebar di seluruh Indonesia dan bekerjasama dengan BSIP agar kepastian akan benih selalu terjaga. Pada pengembangan kawasan perkebunan unggulan nasional yang berbasis korporasi petani dialokasikan anggaran sebesar 174,53 miliar. Kegiatan ini termasuk intensifikasi kopi 5.000 hektar, perbaikan kesuburan lahan atau penggunaan aplikasi senyawa humat sebanyak 250.000 liter, budidaya tanaman pala seluas 1.000 hektar, intensifikasi cengkeh luar 100 hektar dan intensifikasi tebu seluas 1.000 hektar.

*Slide 6.* Rancangan realokasi anggaran dan penambahan *automatic adjustment* sebagai tindak lanjut hasil Raker tanggal 27 Maret 2023 merubah komposisi anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan dari 1,138 triliun menjadi 1,118

triliun yang mengalami penurunan sebesar 20,818 miliar. Perubahan alokasi pagu per Eselon II sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar menjadi 261,56 miliar;
- Penguatan perlindungan perhimpunan 62,64 miliar;
- Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah 120,14 miliar;
- Pasca panen dan pengolahan hilirisasi pemasaran hasil perkebunan 192,81 miliar;
- Penguatan perbenihan perkebunan 280,14 miliar;
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya 200,70 miliar.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Pagu Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar mengalami penurunan sebesar 18,72 miliar dari 280,29 miliar menjadi 261,56 miliar. Penurunan ini terjadi pengurangan pada pengembangan kakao dari 8.050 menjadi hektar 6.400 hektar. Kawasan karet dari 6.900 hektar menjadi 1.700 hektar. Kawasan pinang dari 400 hektar menjadi 300 hektar dan koordinasi Bimtek kegiatan dari 87 kegiatan menjadi 65 kegiatan. Kawasan kopi dan kelapa merupakan fokus pengembangan kegiatan yang utama terus didorong sebagai penopang menghadapi krisis pangan.

*Slide 8.* Pagu Direktorat Perlindungan Perkebunan mengalami penurunan sebesar 20,2 miliar dari 82,84 miliar menjadi 62,64 miliar. Penurunan terdapat pada kegiatan penanganan organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan dari 40,85 miliar menjadi 14,05 miliar. Sedangkan kegiatan yang mengalami kenaikan pada Bimtek Perlindungan Perkebunan dari 33 kegiatan atau 3,3 miliar menjadi 50 kegiatan atau 5 miliar dan penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakarannya naik menjadi 6 miliar.

Pagu Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah mengalami penurunan sebesar 8,06 miliar dari 128,2 miliar menjadi 120,14 miliar. Penurunan terdapat pada kegiatan peraturan norma pedoman dari 11,5 miliar menjadi 11,41 miliar. Kawasan tanaman semusim dan rempah lainnya dari 920 hektar menjadi 795 hektar. Sedangkan kegiatan yang mengalami kenaikan pada koordinasi Bimtek kegiatan dari 33 kegiatan atau 3,3 miliar menjadi 60 kegiatan Bimtek menjadi 6 miliar.

Pagu Direktorat Pengolahan... *slide 10...* dan Pemasaran Hasil Perkebunan mengalami penurunan sebesar 0,4 miliar dari 193,21 miliar menjadi 192,81 miliar. Penurunan terdapat pada kegiatan sarana pasca panen sedangkan kegiatan yang mengalami kegiatan pada koordinasi Bimtek kegiatan dari 88 kegiatan 10,74 miliar menjadi 105 kegiatan 12,44 miliar dan prasarana pengelolaan dari 16 unit menjadi 20 unit.

Pagu Direktorat Perbenihan Perkebunan mengalami kenaikan sebesar 29,05 miliar dari 259 menjadi 280,14 miliar. Kenaikan terdapat pada kegiatan koordinasi Bimtek kegiatan dari 30 kegiatan menjadi 50 kegiatan. *Nursery* dari 21 unit menjadi 47 unit sedangkan kegiatan yang mengalami kegiatan penurunan pada kebun sumber benih bahan tanam dari 1.129 hektar menjadi 1.128 hektar.

Demikian yang dapat kami sampaikan rencana dari program kerja Direktorat Jenderal Perkebunan.

*Wabillahi taufiq walhidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Ini saya ingatkan permasalahan produksi coklat yang turun terus-menerus karena produktivitasnya semakin lama semakin rendah. Yang kedua, pohonnya sebagian kena penyakit yang hasil coklatnya sangat menurun sekali. Yang ketiga, perlu kita ketahui harga karet dunia ini lagi hancur, hampir semua pabrik karet gulung tika. Jadi kalau hanya dibantu bibit kemudian tidak dibantu prasarana lain petaninya ya *wassalam* sudah. Ini kan terjadi apabila minyak dunia harganya rendah, otomatis karet alam juga ikut turun tetapi kalau minyak mentah dunia naik akan terdampak juga masalah karet alamnya ya. Ini saya ingatkan juga jangan hanya bantu bibit tapi tidak ada bantuan lainnya kepada petani. Kasihan petani, petani karet itu sudah sampai sekian puluh tahun itu menderita, baru ada kenaikan sedikit kemudian harga minyak dunia anjlok lagi.

Lanjutkan, Sekjen.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak ketua.

Dirjen Peternakan.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak Sekjen

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh* dan selamat siang  
Salam sehat buat kita semua.

Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi IV DPR RI,  
Ibu Ketua yang kami hormati, serta  
Seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Mohon izin kami sampaikan sekilas tentang anggaran Dirjen PKH tahun 2023 pasca rapat kerja beberapa waktu yang lalu. Langsung ke *slide* 4. Total anggaran untuk pasca rapat kerja adalah 2,85 triliun karena adanya pemotongan sebesar 75 miliar dan dari anggaran 2,8 triliun terbagi atas belanja barang termasuk bantuan bumper dan lain-lain di sini sebesar 2,5 triliun atau sebesar 89,4%. Kemudian belanja pegawai 5% dan belanja modal 5,6% sehingga total menjadi 2,8 dengan rincian kantor pusat 910 miliar, kantor daerah 1 triliun dan tugas perbantuan 900 sehingga total 2,8.

Lanjut di *slide* 5. Dari jumlah itu maka Dirjen PKH dengan total 2,83 dibagi ke tiga kelompok utama yaitu program izin akses dan konsumsi pangan berkualitas 2,5 triliun, kemudian nilai tambah dan daya saing 28 miliar dan program manajemen 317.

Langsung ke *slide* 9. Perubahan *automatic adjustment* tahun 2023 dari awal 474,2 miliar, kemudian fase RDP 24 Januari 224 dan rancangan Raker 20 Maret 369,28 sehingga total potensi untuk blokir AA 105 miliar dan direncanakan untuk penggunaan operasional vaksin PMK dan pengadaan sarana desinfektan obat-obatan dan sejenisnya.

Demikian yang kami dapat sampaikan di hadapan

**KETUA RAPAT:**

Saya tanyakan, jumlah vaksin PMK saat ini masih berapa puluh juta?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Izin, Pak Ketua.

Saya buka dulu data detailnya.

**KETUA RAPAT:**

25 juta apa 30 juta? Anda sebagai Dirjen saja data saja mesti buka dulu.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Stok vaksin, Pak untuk PMK ada 34.642.000 dosis.

**KETUA RAPAT:**

Anda masih ingat Raker yang lalu Anda mengatakan berapa?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

30 juta, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang naik jadi 32 juta.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Angka pastinya ini 34.

**KETUA RAPAT:**

Waktu itu Anda mengatakan tidak sampai 30 juta. Hari ini 32 juta kemudian 34 juta. Kapan *expired*-nya?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Dua tahun, Pak Ketua sejak...

**KETUA RAPAT:**

Dua tahun dari kapan? Tidak semua dua tahun.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Desember 2022.

**KETUA RAPAT:**

Kan tidak semua datang sekaligus 30 juta. Betul?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Desember terakhir masuk, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Anda simak pertanyaan saya ya. Anda mengatakan antara 32 juta atau 34 juta.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya. Yang *expired*-nya dua tahun lagi itu dari kapan? Kalau Anda bilang Desember 2022, memang langsung Desember 2022 datang 32 juta, kan *enggak*, itu bertahap *loh*. Saya rasain setahun lalu pun masih ada, belum tersalurkan itu karena pengadaannya kan terlalu *over* sekali. Sementara Anda tidak pikirkan LSD itu butuh vaksin, cobalah.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya, LSD juga, Pak Ketua ini juga kami akan sampaikan bahwa kita itu perkiraan kebutuhan kita kurang lebih 10 juta. Yang ada di kita saat ini termasuk dengan hibah itu baru satu juta lebih sehingga kita masih kekurangan 9 juta dosis 9,9 yang kita butuhkan yang ada baru 1,5 juta.

**KETUA RAPAT:**

Yang bantuan satu juta lebih sudah terpakai berapa?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Sekarang pada posisi.



**KETUA RAPAT:**

Jangan salah *loh* nanti dua minggu lagi saya tanyakan.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ini baru realisasi vaksin per 1 April 273.000

**KETUA RAPAT:**

Kata Anda laik untuk dibeli lagi?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Iya, Pak?

**KETUA RAPAT:**

Laik untuk kita pengadaan lagi sementara baru dipakai 273.000 berarti masih, masih ada stok 600.000 sekian. Laik *enggak* kita beli pengadaan sekarang?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ini kan kita mau bicara satu tahun, Pak Ketua sampai dengan Desember. *Nah*, perkiraan kita kalau...

**KETUA RAPAT:**

Saya tanya, vaksin LSD tiba bantuannya kapan? Desember apa Januari?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Yang hibah LSD belum tiba, Pak, baru hibah tahun 2023.

**KETUA RAPAT:**

Tadi Anda bilang sudah, sudah ada bantuan 1 juta, betul *enggak*? Dengar dulu saya ngomong. Sudah terpakai 273.000 ya *toh*?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Betul *enggak*?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Izin, Pak Ketua.

Jadi yang eksisting 2023 per hari ini dari APBN kita 100.000 kemudian dari hibah 1 juta.

**KETUA RAPAT:**

Sudah datang?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Sementara proses, Pak, untuk yang hibah 1 juta.

**KETUA RAPAT:**

Tadi Anda bilang 100.000 pakai APBN, yang sudah terpakai 273.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Itu stok dari tahun lalu, Pak Ketua yang dipakai sekarang. Tahun lalu itu ada stok kita 200 449.000 dari pengadaan.

**KETUA RAPAT:**

Terus Anda mau mengadakan lagi tahun ini?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

100.000, Pak, dari anggaran yang ada.

**KETUA RAPAT:**

Yang sisanya tadi dari yang bantuan?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

449 jadi tambah APBN 500, sekarang per April 273 sudah tervaksin, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Bantuannya berapa juta?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Satu juta.

**KETUA RAPAT:**

Satu juga belum terpakai?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Belum datang juga, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Jadi belum terpakai?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Belum, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Tadi Anda katakan sudah kepakai 273 itu sisa yang lalu.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Sisa yang lalu.

**KETUA RAPAT:**

Sama yang sekarang.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Sisa yang lalu yang meluncur itu 449.000 dipakai 273.000.

**KETUA RAPAT:**

Tahun lalu?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya.

**KETUA RAPAT:**

Tahun ini belum ada pengadaan APBN untuk LSD?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Belum, Pak, baru proses karena harus meminta persetujuan karena ini harus impor pengadaan dalam negerinya belum ada.

**KETUA RAPAT:**

Saya ini bingung ini sisa vaksin saja sampai 32 juta apa 34 juta ini. Saya enggak yakin ini bisa berjalan semua termasuk juga *ear tag* walaupun Anda mengatakan *ear*

*tag* itu dicetaknya di Peruri. Saya mungkin bukan ahli teknologi, kira-kira *nih* Dirjen Anda jawab. Kalau Anda ke kampung ke kampung ya bukan di kota, Anda mau *ear tag* kan pakai barcode ini, harus pakai sinyal *enggak* barcode-nya?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Sekarang sudah bisa *offline*, Pak.

**KETUA RAPAT:**

*Enggak* yang sekarang ini yang Anda pasang, bukan, yang saya tanyakan Anda akan pasang *nih* yang Peruri cetak nih kalau tidak ada sinyal bisa *enggak? enggak* ada *wi-fi* karena kemarin saya sudah mengecek nih di Tanjung Bintang Kecamatan Tanjung Bintang.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Kalau pengisian datanya bisa secara, *offline*, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang *nih* sudah divaksin dua kali.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Untuk saya mengetahui kan saya masih pakai barcode toh, betul *enggak?*

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya.

**KETUA RAPAT:**

Kalau di wilayah tidak ada sinyal, bisa *enggak* tertangkap?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Kita pakai secara manual bisa, Pak. Jadi tidak memakai menggunakan barcode tapi langsung dimasukkan input nomornya maka keluar datanya, Pak. Jadi bukan *enggak* pakai barcode di wilayah-wilayah yang tidak pakai...

**KETUA RAPAT:**

Walaupun *enggak* ada sinyal bisa?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Itu kan Anda, mantri mengerti *enggak*, penyuluh peternakan mengerti *enggak*. Anda belum pernah ngadain Bimtek kepada mereka *kok*, orang saya tanya. Pak kalau mau mengecek ini bagaimana *sih* caranya, saya *enggak* mengerti Pak walaupun Bapak bilang saya ini Anggota DPR Komisi IV yang membidangi peternakan, saya bodoh, Pak, saya *enggak* mengerti Pak, lah saya juga *enggak* paham, Pak. Coba bagaimana.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Baik, Pak, menjadi perhatian kami akan melakukan sosialisasi lebih kuat lagi di petugas.

**KETUA RAPAT:**

Saya bingung harus ngomong apa. Ada lagi?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Izin, Pak Ketua.

Dirjen PSP.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pak Ketua yang kami hormati,  
Ibu Ketua dan semua Anggota Komisi IV DPR RI yang kami banggakan,  
Pak Sekjen, Bapak-Ibu semua, rekan-rekan Eselon I dan Eselon II yang hadir pada kesempatan sore hari ini,

Izin, Pak Ketua, kami sampaikan dari PSP mohon slide keduanya Mas ya terus ya. Izin, Pak Ketua, ini kami gambarkan tadi apa yang sudah disampaikan mungkin tadi sudah disampaikan Pak Sekjen terkait dengan anggaran kita. *Enggak slide* sebelumnya, Pak, slide sebelumnya ya. Ini tadi yang terkait dengan jumlah anggaran kita di PSP dan jumlah *automatic adjustment* kita itu akhirnya menjadi karena anggaran kita awalnya dulu itu 2,7 terus menjadi 3,085 terus ada *automatic adjustment* sekitar 134, akhirnya itu anggaran kita menjadi 2,951 kira-kira begitu, Pak yang di PSP.

Terus rancangan kegiatan dan anggarannya untuk tahun 23 ini, *slide* berikutnya Mas, *slide* berikutnya ini ini ada di enam Direktorat dan/atau Eselon II

termasuk Sesdit. Itu yang pertama di Direktorat Irigasi, pengelolaan air irigasi untuk pertanian itu total anggarannya sekitar 446 M terdiri dari beberapa kegiatan itu termasuk dari Bimtek, fasilitasi pengembangan sistem pertanian terpadu dalam dataran tinggi, kemudian survei investigasi termasuk pembangunan embung yang arahan Pak Ketua dan Anggota beberapa waktu atau awal kegiatan kita ini di 23 dan termasuk rehabilitasi embung pertanian, bangunan konservasi air dan antisipasional iklim. Di sana ini ada calon blokir, Pak Ketua, izin yang AA kita itu ada di situ sekitar 34 M.

Terus kemudian, di yang kedua di Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan itu anggarannya hanya sekitar 335,17 M. Itu ada di sana yang jalan usaha tani termasuk rekomendasi perlindungan LP2B kita, Pak, untuk alih fungsi lahan itu ada LSD pemetaan semuanya dan termasuk data lahan pertanian ada di sana itu.

Kemudian yang ketiga, itu Direktorat Jenderal, Direktorat Prasarana khususnya pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat urusan pertanian. Ini anggarannya sekitar 788,87 M, ini terdiri dari selain Bimtek tentu ada di sana traktor roda empat. Ini tentu semuanya mendukung kesimpulan nomor 3 kemarin, Pak, pada saat Raker itu yang terkait dengan dukungan prasarana sarana pertanian tentu di dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian kita, itu di kesimpulan nomor 3 Raker minggu lalu itu. Di sana ada traktor roda empat, traktor roda dua, pompa air *hand sprayer*, cultivator dan perbengkelan Alsintan termasuk ada di sana transport roda tiga.

Terus kemudian di direktorat berikutnya adalah di fasilitasi pupuk dan Pestisida. Ini ada ini yang lebih banyak perubahannya, Pak Ketua, karena di sini langsung yang terkait dengan peningkatan produktivitas tanaman kita, Pak Ketua. Jadi di sana selain UPPO ada pendampingnya juga APPO seperti yang disarankan oleh Pak Ketua juga dan beberapa Anggota di awal dulu bahwa selain UPPO/Unit Pengelola Pupuk Organik juga dibutuhkan alat, alat khusus alat pengolah pupuk organik. Jadi itu kita masukkan di sana juga termasuk di sana untuk program pengembalian kesuburan tanah adalah pupuk organik apakah itu cair, hayati dan lain sebagainya termasuk ada pupuk kieserite, mikro, silika ada komposer dan lain sebagainya itu yang semuanya itu adalah untuk peningkatan kesuburan tanah kita, Pak Ketua.

Jadi izin, Pak Ketua, sekedar data saja. Tanah sawah kita 7.463.948 hektar itu, itu sekitar 36% alat tadah hujan dan yang mengandung kandungan organik KC organik di bawah 2% rendah maksudnya itu, itu sekitar 65%-an sehingga memang dari program kita ini pun sebenarnya masih kurang kalau ditinjau dari kebutuhan hara sawah kita, Pak Ketua ini khusus sawah dan termasuk nanti untuk pupuk mikronya, kami mendukung nanti di Hortikultura terkait dengan peningkatan produktivitas tanaman kita di Hortikultura. Kami tentu akan berdiskusi dengan Pak Dirjen Horti nanti komoditas mana apakah itu cabai atau bawang atau yang lain yang menjadi prioritas di sana itu.

Kemudian direktorat berikutnya adalah fasilitasi pembiayaan. Ini sekitar 198,6 M. Di sana ada blokir AA direncanakan itu, Pak Ketua, itu sekitar 95 M yang terkait dengan asuransi. Kenapa ini dimasukkan? karena beberapa atau dua tahun terakhir ini dukungan asuransi untuk premi dari daerah, kami merasa itu sangat rendah sekali sehingga kalau nanti memungkinkan itu dibutuhkan, kami akan tentu berusaha membukanya melalui Pak Menteri atau Pak Sekjen tentunya, Bapak-Ibu semua.

Terus yang terakhir adalah dukungan manajemen itu sekitar 186 itu dikurang 67 dan ada AA 5 M. Enam puluh tujuh itu adalah yang ada di Satker kita di Satker yang menangani PSP di daerah ada di 93 Satker di 33 provinsi. Terus *slide* berikutnya, *slide* berikutnya ini yang tadi rincian AA dan terakhir adalah gambaran yang rencana alokasi mohon maaf dukungan untuk aspirasi Bapak-Ibu semua yang sudah kita sepakati kemarin itu. Ini ada UPPO, traktor roda dua, roda empat dan seterusnya Bapak-Ibu semua termasuk JIT, JUT, cultivator dan lain sebagainya.

Saya pikir itu yang kami sampaikan, Pak Ketua, izin Bapak-Ibu semua.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Coba diulangi lagi *slide*-nya dari awal tadi saya lihat. Ulangi lagi tadi.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Dari slide pertama, Pak, iya siap ini, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Terus, terus, terus. Saya masih *enggak* paham irigasi pemompaan besar wilayah barat, tengah, timur, wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur ini apa ini.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Izin, Pak Ketua, karena ini di dalam SBK-nya berbeda, Pak Ketua, kami membaginya menjaral itu di wilayah barat harga satuannya beda, Pak Ketua sehingga kami coba membagi seperti ini, sekitar 20 unit per wilayah barat. Terus kemudian ada tengah ini artinya wilayah barat, tengah, timur ini, Pak Ketua tergantung karena SBK-nya beda, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oh, biaya kemahalan.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Siap. Bukan biaya kemahalan, biaya untuk satuan, Pak, harga satuan, Pak, di sana.

**KETUA RAPAT:**

Iya biaya satuan itu kan misalnya kalau di Jawa 2 juta, kalau di Papua ongkos lebih mahal, bahan baku lebih mahal itu namanya biaya kemahalan, Bos. Kalau Pak Salim bilang biaya kenakalan, beda ya.

Kemudian lagi ini lahan konservasi dan rehabilitasi apa ini? saya *enggak* mengerti. Apa yang dikonservasi dan direhabilitasi.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Iya izin, Pak Ketua, ini di lahan-lahan yang terdegradasi kesuburannya, Pak Ketua. Jadi lahan-lahan tentu yang terdegradasi atau menurun kesuburannya, di situlah kita masuk untuk lahan konservasi dan rehabilitasi, Pak Ketua, kira-kira maksudnya begitu. Misalnya bisa jadi kita masuk di lahan-lahan kering, Pak Ketua, yang misalnya tingkat kesuburannya sangat rendah, itu bisa kita masuk ke sana di lahan-lahan kering misalnya seperti itu atau juga di lahan-lahan ex-tambang misalnya kalau itu ada dimasukkan ke sana, Pak Ketua ya.

**KETUA RAPAT:**

Karena saya lihat ini dari yang awal ini ada perubahan ini, di sini *enggak* dimasukkan ini.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Siap, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Nanti saya berikan kepada Anda. Coba *next*.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Siap, pak karena ada penyesuaian, Pak Ketua terhadap ini RAB-nya.

**KETUA RAPAT:**

Jadi teman-teman Anggota Komisi IV, kalau periode lalu itu hanya ada UPPO tapi periode 2009-2014 itu ada namanya APPO/Alat Pengolahan Pupuk Organik. Jadi kalau petani itu sudah punya sapi, tidak perlu kita berikan sapi, kita berikan saja alatnya alat hanya untuk pengolahannya maka kala itu itu usulan saya ya. Kira-kira kalau KP3 ini dengan 6 miliar seluruh Indonesia cukup, *enggak*?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Izin, Pak Ketua untuk yang komisi pengawasan pupuk pestisida kita ini, Pak, ini hampir semuanya di pusat, Pak, karena yang di kabupaten misalnya, Pak, itu ada dari Kemendagri, Pak. Jadi ada aturan dari Mendagri itu tidak bisa kita bayar, Pak Ketua, jadi ini hanya untuk yang di pusat, Pak Ketua. Jadi kita berkoordinasi dari pusat nanti kami sudah meminta ke Dirjen Bangda, Pak di Kemendagri supaya untuk KP3 kita mereka bantu juga dari...

**KETUA RAPAT:**

*Enggak*, kira-kira cukup *enggak*?



**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Tidak cukup, masih sangat kecil, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Kalau tidak cukup kenapa *enggak* ajukan anggaran kerja sama dengan produsen pupuknya. PIHC dimintakan untuk kerja sama mem-*back up* biaya operasional pengawasan penyelewengan pupuk di kabupaten kota maupun di provinsi.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Siap, kami lakukan, Pak Ketua, kami laksanakan.

**KETUA RAPAT:**

Ya kan, dia hanya produksi terus lepas tanggung jawab.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Tapi mudah-mudahan bisa masuk di kesimpulan, Pak Ketua

**KETUA RAPAT:**

Ya, masukkan kalau belum ini masukkan, mereka juga harus bertanggung jawab atas distribusinya dong.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Iya benar, Pak Ketua...

**KETUA RAPAT:**

Misalnya kalau disini dimasukkan 6 miliar, mungkin dia bisa bantu satu tahun 12 miliar, itu kan membebani kekurangan Anda dan lebih efektif untuk lebih pengawasannya

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Siap, betul, Pak. Ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Kemudian pupuk silika untuk apa ini. Saya baru dengar tiba-tiba selama saya jadi Anggota DPR, *enggak* pernah dengar ada pengadaan pupuk silika ini.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Silika ini, Pak Ketua, adalah untuk terutama ya padi kita, Pak, terutama padi adalah untuk menguatkan batang. Menguatkan batang. Jadi satu hal sebenarnya kalau petani kita rapi dan... maksud saya begini, Pak itu kan bersumber dari jerami, Pak salah satunya, Pak. Salah satunya bersumber dari jerami selain dari yang tanah sendiri, Pak. Nah, kalau jerami itu *pure* dipulangkan ke tanah sebenarnya itu silikanya itu bisa relatif aman, Pak Ketua. Jadi sekamnya juga ada karena itu kan diambil oleh tanamannya, Pak. Jadi disekamnya juga ada di batangnya juga ada jerami ya maksudnya, Pak ya. *Nah*, sehingga kita harapkan terutama nanti di sentra-sentra produksi yang misalnya terancam rebah misalnya begitu, Pak, karena juga ini kan terbatas, Pak Ketua, ini hanya sekitar 192.000 hektar, Bapak. Jadi ini akan diperuntukkan untuk daerah-daerah yang misalnya rentan rebah, Pak, sehingga dengan silika ini meningkatkan atau menguatkan jaringan-jaringan tanaman padi kita, Pak Ketua. Kira-kira ke situ maksudnya ini, Pak Ketua.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Ya, karena ketua tanya itu saya juga tanya bareng-bareng yang saya belum tahu juga...

**KETUA RAPAT:**

Saya ingin tanyakan lagi ini, pernah dicoba di mana karena setahu saya kalau padi sudah rebah ya rebah saja. Jadi saya minta yang 70 ini coba dievaluasi dulu ya, dicarikan program yang benar.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Karena ketua tanya itu saya juga mau tanya itu. Pupuk gliserin itu pupuk apa ya saya juga kayaknya harus tahu juga itu kayaknya belum pernah saya tahu itu pupuk gliserin itu apa.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Izin. Izin, Pak Ketua, kieserite bu ya. Kieserite, kieserite. Ya, kieserite itu MgSO<sub>4</sub>, MgSO<sub>4</sub> ini tadi yang kami sampaikan pupuk MgSO<sub>4</sub> ini, kieserit ini dibutuhkan sebenarnya untuk tanaman-tanaman yang sangat membutuhkan Mg. Mg ini sebenarnya adalah intiklorof itu, Pak, intiklorofil sebenarnya sesungguhnya tanaman semua butuh ini, Pak, butuh Mg ini karena itu merupakan inti klorofil. Jadi zat warna hijau daun itu intinya adalah Mg yang ada salah satu dikandung oleh kieserite ini. *Nah*, saya tentu kita, kami, Bapak-Bapak, Ibu semua kalau membawa kieserite ini berarti adalah tadi apakah ini bisa nanti untuk ke tanaman-tanaman Hortikultura kita yang rentan terhadap itu, Pak, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, izin Pak. Kalau hasil penelitiannya barangkali Pak Kepala BSIP, Pak, karena ini pernah kami teliti juga di Badan Litbang, Pak Ketua untuk yang silika, Pak. Barangkali kalau boleh di saya minta tolong nanti disampaikan...

**KETUA RAPAT:**

Ya, nanti BSIP belakangan.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Siap, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, jangan nanti silika Anda bilang begini seperti apa namanya oh daun-daunan diremas-remas yang nanti pengganti pupuk untuk bla bla bla bla bla.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

*Enggak*, Pak izin.

**KETUA RAPAT:**

Ini kan sangat lucu sekali kedengaran. Saya minta tolong itu nanti dievaluasi.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Siap, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang juga kita pikirkan begini *loh*, Dapil Pak Hanan ada *enggak*? banyak *enggak* wilayah persawahan kena hama tikus? Kan *enggak* pernah dipikirkan di sini. Hama wereng juga tidak pernah dipikirkan di sini dananya berapa. Kemarin saya panen di Metro hampir 30%, saya tanyakan *kok* ada yang sudah menguning sudah masih banyak yang hijau, yang hijau itu dimakan tikus, hama tikusnya melimpah. Ini yang harus kita cegah untuk meningkatkan atau mempertahankan produksinya jangan sampai menurun. Saya minta nanti dievaluasi itu.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Siap, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, lanjut Sekjen.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Ketua, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Kalau mau dievaluasi juga beberapa jenis pupuk yang (*suara tidak jelas*).

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, sebutkan yang mana? Ya, lanjutkan, Pak Sekjen.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepala BPPSDMP, silakan.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV dan seluruh Anggota,  
Rekan-rekan sekalian dari Kementerian Pertanian,

Izin ke halaman 8. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekjen bahwa alokasi pagu anggaran untuk Badan SDM 2023 itu sejumlah 935 miliar ya yang sebelumnya 946 ada *refocusing* 6 miliar ke Dirjen BUN dan terakhir *refocusing* 5 miliar ke BSIP. Selanjutnya, *automatic adjustment* di Badan SDM tadi sudah disampaikan oleh Pak

Sekjen 29 miliar. Kemudian ada beberapa realokasi internal BPSDMP yang mungkin ini perlu kami sampaikan.

Yang pertama, paket data penyuluhan pertanian total Rp17.745.000.000,00. Kemudian yang kedua alokasi untuk penganggaran PENAS yang sedianya 5,9 miliar saat ini totalnya ada 15 miliar di halaman 9, halaman 9 nomor 7, halaman 9 nomor 7...

**KETUA RAPAT:**

Kenapa dari 9 menjadi 15?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Asalnya 5,9 itu menjadi 15 miliar, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Apa tambahannya untuk biaya bikin YouTube lagi begitu? *Enggak* kita mesti jelas. Anda mengatakan awalnya berapa?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Lima koma sembilan.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang jadi?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Lima belas.

**KETUA RAPAT:**

Kenapa enggak 150 miliar sekalian pasang situ, tanggung kalau cuma naiknya 15 miliar berarti ini kan perencanaannya *enggak* matang kalau begini. *Enggak*, saya mesti *clear* dulu jawabannya kenapa dari 5,9 jadi 15 miliar.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Asalnya memang kami hanya sebagian, Pak, terutama untuk pembukaan. Untuk pembukaan, namun demikian sekarang termasuk juga untuk penutupan untuk acara penutupan semuanya di-*cover*...

**KETUA RAPAT:**

Kenapa *enggak* perencanaannya dari awal?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya, awalnya kami hanya bisa 5,9 *nah* kemudian arahan dari Pak Sekjen ada *automatic adjustment* di Badan SDM yang dikurangi kurang lebih delapan koma sekian miliar, *nah* kemudian dimasukkan ke situ sehingga totalnya menjadi 15...

**KETUA RAPAT:**

Sekjen benar begitu dari 5,9 Anda usulkan supaya naik jadi 15 miliar?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Sarannya pada waktu itu belum kita bicarakan dan pertama ada usulan dari Anggota pada saat itu Pak Hermanto, Pak, Pak, Pak Ketua dan juga beberapa, Pak Hanan. Saya kira beberapa untuk... karena anggaran, anggaran yang biasa kita alokasikan itu memang sekitar 15, Pak, 15 ke atas.

**KETUA RAPAT:**

Saya *enggak* bicara kebiasaan, yang saya tanyakan itu Anda yang menyuruh dari 5,9 jadi 15 yang seperti dikatakan tadi?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Tidak.

**KETUA RAPAT:**

Tidak.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Tidak, jumlahnya tidak saya sebutkan.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang kira-kira kalau pembukaan sama penutupan mahal mana? Coba jawab.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Jadi, sebetulnya awalnya hanya sebagian saja ya, sebagian kecil yang kita *cover*. *Nah*, kemudian atas usulan memang itu dimulai dari usulan dari sini Komisi IV.

**KETUA RAPAT:**

Siapa yang mengusulkan usulan dari Komisi IV?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Saat itu Pak Hermanto dengan Pak Hanan.

**KETUA RAPAT:**

Mengusulkan supaya menaikkan?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Betul.

**KETUA RAPAT:**

Betul Pak Hanan?

**F-PG (Ir. HANAN A. ROZAK, M.S.):**

Izin Pak Ketua.

Boleh ngomong?

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PG (Ir. HANAN A. ROZAK, M.S.):**

Ya, jadi ini mengumpulkan bertemunya 50 ribuan petani se-Indonesia di Padang ya. Anggarannya memang cukup besar karena konsumsi pada saat pembukaan dan penutupan itu ditanggung oleh panitia pusat dalam hal ini termasuk Kementerian Pertanian. Anggaran 5,9 itu sangat kecil sekali untuk ukuran mengadakan kegiatan yang sebesar itu, mulai dari (*suara tidak jelas*) kalau tidak salah sangat mahal memang. *Nah*, sehingga waktu itu kawan-kawan dari KTNA melalui kami kebetulan saya juga mengurus KTNA meminta untuk bagaimana diupayakan untuk ditingkatkan lagi. *Insya Allah* dengan 15 miliar acara itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.

Di Kalimantan Timur pada kesempatan acara di Kalimantan Timur menghabiskan 25 miliar. Kemudian ada di Sumsel ya itu sekitar 15 miliar kita acuannya Sumsel, Pak.

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Kita jangan bicara anggaran yang lalu-lalu karena sekarang ini lagi banyak anggaran *refocusing* ya. Awalnya 5,9 pembukaan kemudian ada penambahan ada penutupan besok ada apa lagi? Pembubaran panitia begitu?

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Izin, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Tadi Pak Lamudin sama saya... jadi begini, Pak Ketua. Ini setelah saya melakukan pendalaman informasi di lapangan dan juga menyerap aspirasi di lapangan bahwa ternyata di baik di pemerintahan daerah maupun tingkat provinsi sebagai ketempatan, itu anggarannya tidak memadai untuk sebesar yang sudah direncanakan oleh pihak kementerian. Kalau hanya mengandalkan anggaran yang di daerah, sejauh ini informasinya *enggak* memang *enggak enggak* memadai untuk dilaksanakan PENAS itu karena ini akan menampung sekitar 50 ribu sampai 60-an ribu penyuluh akan berkumpul di sana dan masing-masing akan menunjukkan prestasi teknologi yang dikuasai dan ditemui yang mutakhir begitu. Jadi ada proses yang panjang juga di situ untuk para pihak menunjukkan prestasi-prestasinya.

*Nah*, jadi itulah karena berbagai pihak mengatakan bahwa ini merasa dananya kurang maka pada saat rapat yang lalu kita mengusulkan supaya dana PENAS ini bisa *enggak* ditambah begitu untuk memenuhi syarat supaya tingkat keberhasilan PENAS ini bisa tercapai dengan berdasarkan badan studi lapangan dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Hanan ya bahwa skala PENAS itu akan tetap mirip juga baik di Kaltim di Sumsel maupun di Aceh.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak Hermanto. Saya paham tetapi kondisinya beda. Waktu di Kaltim itu tidak ada *refocusing*, anggaran masih *full*, masih besar ya tetapi kalau sampai tiga kali lipat ini kan perencanaannya *enggak* matang. Saya bukan tidak setuju masalah PENAS, saya setuju tetapi *kok* perencanaannya bagaimana. Ada pembukaan, *enggak* ada penutupan tiba-tiba ada pembukaan ada penutupan. Cobalah perhatikan itu.



Saya minta dievaluasi kembali. Kalau misalnya dari 5 okelah ada penambahan jadi 10 itu masih *fair*, ini tiba-tiba jadi 15 lebih.

Silakan lanjutkan.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

realokasi internal tersebut saya kira yang berubah itu saja, Pak Ketua. Jadi yang pertama tadi paket penyuluhan, paket penyuluh ya paket data penyuluh kemudian yang kedua PENAS.

Saya kira itu.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Saya tanyakan, Anda tahun lalu mengirim magang ke Taiwan berapa orang?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Lima puluh lima orang.

**KETUA RAPAT:**

Biayanya dari mana?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Biayanya itu mandiri, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Mandiri?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya.

**KETUA RAPAT:**

Mandiri apa maksudnya? Anda tidak mengeluarkan uang anggaran?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ada mengeluarkan sedikit untuk pelatihan *pre-departure*.

**KETUA RAPAT:**

Berapa ratus juta? Anda jangan bilang mandiri. Anda ini mengeluarkan uang, jangan saya pikir Anda pikir saya *enggak* tahu catatannya.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya. Maksud saya sebagian besar ditanggulangi oleh peserta sendiri termasuk tiket.

**KETUA RAPAT:**

Tadi Anda bilang Mandiri? Kemudian Anda mengeluarkan dana, sekarang sebagian besar oleh ini tahun 2022, 2023 ada rencanakan kirim berapa lagi?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Belum, Pak ya. Kita menunggu kuota yang disampaikan oleh Taiwan.

**KETUA RAPAT:**

Anda belum ada data?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Belum.

**KETUA RAPAT:**

Belum? Jawab yang bilang.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Tahun ini belum ada kuota, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Saya tanya sekali lagi. Anda sudah dapat info belum punya data berapa untuk dikirim ke Jepang?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ke Taiwan.

**KETUA RAPAT:**

Ke Taiwan.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Belum.

**KETUA RAPAT:**

Sudah ada 350 orang kalau Anda belum paham.

**F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):**

Izin, Pak Ketua, boleh?

**KETUA RAPAT:**

Sebentar. Selama di Taiwan itu ditanggung oleh negara Taiwan tetapi untuk awalnya di Indonesia menjadi tanggung jawab Anda. Kemarin Anda setelah rapat Anda ngomong apa sama Salim di luar? Jelaskan Pak Salim.

**F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):**

Yang masalah petani millennial.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):**

Beliau mengatakan ini kan dana KUR. Saya maka saya konfrontasi sama Ketua, kalau itu dana KUR Pak Sudin, kenapa Pak Sudin sibuk. Bukan uang negara, uang pinjaman. Makanya itu saya tanya, nanti dibilang orang Pak Sudin nanti kurang apa sementara beliau katakan bukan uang apa uang KUR yang dibagi-bagi.

**KETUA RAPAT:**

Coba dijelaskan.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Jadi acara terakhir yang saya sampaikan di Ciawi itu...

**KETUA RAPAT:**

Bukan di Ciawi, di Makassar. Saya sebutkan di Makassar, Anda mau fotonya? Anda tahu ada yang belum dibayar.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Di Makassar juga ada.

**KETUA RAPAT:**

Ada? Ada yang belum dibayar juga? Orangnya minta transfer, perlu saya tunjukkan kata-kata WA-nya, perlu? Kan sudah saya katakan. Kita ini mitra saling jujur saling terbuka, kita cari solusi jalan keluar terbaik. Anda *kok* tiba-tiba bilang sama Salim seolah-olah Ketua itu *bego*, *enggak* mengerti itu kan pakai KUR, betul Salim?

**F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):**

Betul cuma bukan Ketua yang *bego*, saya yang bilang kalau dana KUR, Ketua ini *bego-bego*, *kok* sibuk mengurus itu, saya bilang. Saya kan jelas dibilang Pak Prof ini dana KUR yang diapakan maka timbul pikiran saya. Loh ini hebat ini profesor ini maka saya *kok* sama Ketua sama masalah sapi jadi nanti dilanjut itu Ketua. Saya pikir sapi *kok* Lampung saja yang dapat. Ini sedikit Ketua waktu

**KETUA RAPAT:**

Ya cukup Pak Salim. Coba dijelaskan dana KUR itu dana apa. Apakah memberikan KUR dapat *fee* atau ada membantu atau apa.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Jadi kita membantu memfasilitasi buat petani milenial untuk mendapatkan KUR dari perbankan, Pak. Jadi begitu yang kita lakukan dan *alhamdulillah* di Makassar juga sebetulnya sama ya. Banyak petani milenial yang berhasil mendapatkan KUR termasuk yang di tempat lain juga begitu, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Anda katakan pelatihan milenial pakai biaya KUR waktu Anda keluar dari sini sama Salim, berarti KUR itu dipakai untuk biaya pelatihan milenial tadi?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Bukan begitu maksudnya, Pak Ketua. Jadi pelatihannya tentu saja itu penganggaran dari kita.

**KETUA RAPAT:**

Satu orang berapa juta? Berapa puluh juta? Jawab jujur.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Tidak sampai puluh-puluh juta, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Iya berapa, *enggak*, berapa? saya mau tahu berapa. Anda Kepala SDMP saja tidak punya data, harus bertanya kiri kanan.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Jadi unit *cost*-nya itu sekitar 1 juta lebih sedikit, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ongkos dari Jakarta berapa ke sana? Ada *enggak* peserta dari Jakarta? Perlu saya sebutkan namanya atau perlu saya tayangkan fotonya orangnya yang duduk samping Anda ya. *Enggak* apa-apa jawab saja, kita terbuka *kok* supaya semua tahu. Sementara penyuluh yang di bawah asuhan Anda hidupnya menderita hanya BOP 300 sampai 400.000, satu hari beli bensin plus makan saja kagak cukup. Jadi Anda nanti kalau pulang Anda *enggak* perlu mengancam anak buah *enggak* usah diancam ya Irjen ya. Tolong ya diperiksa saja. Pulang *enggak* usah ancam anak buah, kumpulin, jangan memberikan informasi kepada Komisi IV bla bla bla bla bla bla. Ini saya ingatkan Anda kembali. Kalau Anda bicara KUR tadi bahwa Anda ada pemotong uang KUR itu atau milenial dikasih uang KUR tapi pelatihannya begitu. Kalau Anda bilang 1 juta lebih, Anda bohong, tidak jujur ya. Bahkan, ada juga yang belum Anda bayar *kok*. Ada yang menagih. Nanti saya kirim WA-nya kalau Anda *enggak* percaya atau saya kirim ke Irjen suruh periksa nanti itu saja.

Lanjutkan Sekjen.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepala Barantan.

**KEPALA BADAN KARANTINA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih Pak Sekjen.

Yang terhormat Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua, Bapak Ibu seluruh Anggota Komisi IV DPR RI dan teman-teman semua,

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang.

Izin langsung ke halaman 9 saja. Alokasi Badan Karantina Pertanian tahun 2023 seperti yang disampaikan Pak Sekjen tadi seluruhnya ada 1,092 triliun dan telah mengalami beberapa pengurangan akibat *automatic adjustment*. Yang pertama senilai 37,4 miliar kemudian berikutnya 18 miliar totalnya ada 55 miliar.

Kemudian ada realokasi sebesar 20 miliar Ke Dirjen PSP sehingga dari total 1,092 triliun menjadi 1,072 triliun. Mohon maaf 1,017 triliun. Alokasi itu digunakan untuk kegiatan rutin Badan Karantina antara lain untuk membiayai dua program kebijakan. Dua program yang pertama program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas dengan beberapa kegiatan antara lain kebijakan bidang pertanian dan perikanan, sertifikasi produk, kemudian ada dukungan aspirasi, bimbingan teknis, sosialisasi petani juga peralatan laboratorium karantina, kemudian kerja sama dan sistem informasi pemerintahan. Kemudian program yang kedua adalah dukungan manajemen. Dari alokasi AA sebesar 55,4 miliar dan realokasi sebesar 20 miliar, itu kita alokasikan dari 52 UPT dan pusat, Pak dan *Insyallah* tidak mengganggu jalannya Karantina di tahun 2023.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Izin, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Cukup, Pak Kasdi?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

BSIP tadi, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

Kami persilakan.

## **KEPALA BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak Sekjen.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV,

Langsung halaman 4.  
Baik.

Setelah pasca Raker tanggal 27 Maret, terima kasih Pak Pimpinan dan Anggota, kami mendapat alokasi tambahan 50 miliar dan kami alokasikan untuk kegiatan. Program nilai kita mengampu tiga program, Pak Ketua: program nilai tambah dan daya saing industri ini tetap tidak ada penambahan. Yang kedua, program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas dari 10 miliar menjadi 50 miliar. Jadi kita alokasikan untuk pekerja dan perbenihan dan Iptek, yang kedua program dukungan manajemen dari 1814 menjadi 1824.

Langsung halaman 9. Jadi untuk program nilai tambah dan daya saing, Pak Ketua, kami mengalokasikan untuk peningkatan kapasitas laboratorium dan pengujian karena nanti di semua UPT kita, Pak Ketua itu akan menjadi lembaga sertifikat produk jadi termasuk menyertifikasi benih bibit di semua provinsi. Oleh karena itu, kami akan menyiapkan beberapa alat-alat yang kecil untuk dalam rangka menjamin kualitas mutu benih bibit yang ada di setiap provinsi. Ini kita alokasikan untuk 53 Satker yang ada di seluruh Indonesia.

Untuk lokasi anggaran perbenihan dari 50 miliar dan dialokasikan Pimpinan dan Anggota, kita mengalokasikan kurang lebih 25 miliar untuk 55 aspirasi lokasi. Untuk kegiatan bimbingan teknis dan benih, jadi bisa pilihan, bisa Bimtek semua atau perbenihan atau kedua-duanya, 25 miliarnya kita alokasikan untuk di luar wilayah yang tidak ada aspirasi untuk di 33 provinsi kita. Yang lain yang kami tambahkan belanja modal di tujuh dari tadinya 7 miliar menjadi 27 miliar, ini untuk ada beberapa UPT kita yang sudah 2-3 tahun kemarin belum kita alokasikan. Pertama, di BSIP Sulawesi Barat yang kena gempa kemarin itu sampai sekarang kita belum rehabilitasi. Mudah-mudahan kita bisa alokasikan di sini. Yang kedua, di BSIP Papua Barat yang dua tahun lalu kebakaran. Ini juga kita akan alokasikan untuk perbaikan termasuk BSIP yang ada di Balai Tanaman Hias yang kemarin kena gempa yang di Cianjur itu juga kita alokasikan dan di Papua. Itu mungkin gambaran, Pak Ketua. Halaman 10 detailnya untuk lanjut.

Ini gambaran benih bibit yang akan kita alokasikan. Kami tambahkan juga informasi, Pak Ketua, kita punya 131 yang namanya dulu kebun percobaan, kebun produksi yang tersebar di 49 unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Kita punya lahan kurang lebih 4.702 hektar dan kami siap saran Pimpinan menyiapkan untuk terkait dengan produksi benih in-situ di masing-masing provinsi dan kabupaten. Jadi kalau Pak Dirjen Tanaman Pangan menyiapkan untuk 33 provinsi, kita siap, Pak Ketua untuk memenuhi kebutuhan padi dan komoditi yang lain.

Itu mungkin, Pak Ketua yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Jangan bicara siap tapi nanti biaya produksinya lebih mahal daripada swasta yang menghasilkan. Itu Suwandi ketawa-tawa itu. Nanti biaya produksinya kalau Anda menghasilkan sekilo biaya produksinya Rp35.000,00 sementara Kementerian Pertanian mengadakan ke swasta dengan yang sama, mutu yang sama, jenis yang sama Rp30.000,00 otomatis ya Anda *enggak* terpakai. Bagaimana BSIP sudah dibantu oleh para Eselon I untuk anggaran pengembangan benih bibit dan lain-lain supaya efisiensi karena Anda tidak mencari untung. *Nah*, daripada BSIP semua peneliti-peneliti S3 yang pinter-pinter itu menganggur, kan lebih baik diperdayakan ya. Saya juga minta itu pengawasannya lebih ketat lagi itu.

Ya, kemarin saya sudah kirim foto juga kepada Dirjen Hortikultura ini. Di Lampung itu ada kentang warnanya merah itu, infonya belum saya cek saya sudah minta saya minta cek ke BSIP Lampung supaya dicek, informasinya benar atau tidak, kandungan antioksidannya tinggi sekali. Saya sudah kirim fotonya kan. *Nah*, ini setelah panen akan saya kirim lagi ke BSIP Lampung untuk diteliti benar *enggak* kandungannya seperti yang dikatakan tetapi kemarin saya dikasih petani memang rasanya enak dan lebih lebih manis hampir mendekati ubi jalar begitu atau kalau kita orang Sumatera bilang mantang ya. Besok saya minta itu juga dikembangkan karena saya rasa itu sesuatu yang sangat unik sekali bagi saya. Pak Irjen ada yang mau ditambahkan? Cukup? Ya silakan.

#### **IRJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak Ketua.

Kami hanya ingin menyampaikan bahwa di tahun 2023 Irjen mendapatkan alokasi anggaran Rp154,221 juta. Kita mendapatkan *automatic adjustment* sebanyak 19 miliar 191 juta dan 286, ini secara menyeluruh kita bagi kepada empat inspektur untuk masing-masing Inspektur 1 hingga Inspektur 4 sebanyak 3 juta 3 miliar 250 juta dan untuk Inspektur Investigasi sebanyak dua juta enam ratus sehingga miliar. Untuk sekretariat diambil sebesar dia *automatic adjustment* sebesar Rp3,5 miliar. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan anggaran sekitar, terdapat kekurangan sebanyak 19 miliar 191.286 ribu rupiah ya.

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi kalau nanti AA-nya dibuka itu kan balik lagi *toh?* Ya diurus Pak Sekjen ya. Anda malas sih ke Bappenas, ke Dirjen Anggaran. Kalau perlu tiap hari datengin, kami ini butuh ini, butuh ini, butuh ini, jangan nanti Irjen anak buahnya ke lapangan, hotel dibayarin, makan dibayarin ya *enggak* benar. Kan itu yang saya maksudkan supaya *clear and clean*, tidak ada daerah meng-*entertainment* auditor yang datang ke provinsi masing-masing ya.



**INTERUPSI F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Pak Ketua, interupsi, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Tunggu dulu *dong* sebentar. Sebentar Pak Ansi.

Sudah cukup Pak Sekjen?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Cukup, Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Cukup.

Ya, Pak Ansi habis Pak Ansi nanti ini ada pandangan fraksi-fraksi saya minta kalau boleh *nih* saya minta ya, tiga menit kalau kali 20, 60 menit, berarti nanti jam 16.00 WIB jawaban singkat baru nanti kita tutup jam 16.30 WIB supaya selesai karena Pak Khalid sudah bolak-balik, bolak-balik mau cepat pulang mau buka puasa di rumah.

Ya, silakan.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Pak Ketua jangan juga terlalu cepat bilang mau kasih naik anggarannya Irjen. Saya akan mulai dengan hipotesis.

**KETUA RAPAT:**

Saya bukan naikkan anggaran Irjen...

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Makanya saya tegaskan...

**KETUA RAPAT:**

Tapi saya bilang tadi apabila AA-nya dibuka yang 19-nya balik lagi supaya jangan ada kalau audit ke daerah ada yang bayarin hotel, ada yang bayarin makan karena anggarannya sudah cukup itu.

Silakan.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Ya, saya mau tegaskan ya, saya memulai dengan hipotesis. Selama proses penganggaran di Kementerian Pertanian ini tidak benar dan banyak dipertanyakan oleh Anggota berarti Irjen tidak kerja, itu hipotesis saya. Saya kasih contoh sederhana, perencanaan itu kan harus berbasis kebutuhan lapangan. Contoh tadi dari 5 ke 15, itu Irjen tahu tidak itu baru satu contoh, belum contoh yang lain. Jadi saya tidak setuju kalau belum apa-apa nanti bilang kalau apa AA-nya kemudian ditarik lagi kemudian Irjen. Saya belum lihat Irjen bekerja, karena apa? karena masih, kami masih mengkritisi banyak hal. Pengawasan pertama internal itu dilakukan oleh Irjen, mestinya kami mendapatkan gambaran satu per satu direktorat jenderal. Misalnya PKH terkait dengan misalnya dukungan manajemen ada 300 miliar, itu dari segi perspektifnya kerja Keirjenan itu benar apa *enggak*, untuk apa saja, misalnya. Tadi dari 5 jadi 15, *kok* Pak Hanan sama Pak Hermanto yang ditanya mestinya Irjen yang bantu menjelaskan. Untuk sementara ini dulu pengantar, ke belakang nanti panjang lagi.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Langsung PDIP karena pertama Pak TA Khalid. Langsung PDIP dulu ya, saya izin Pak TA Khalid.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Baik.

Terima kasih.

Pak Sekjen pertanyaan berikut saya mau tanya. Kementerian Pertanian ini koordinasinya dengan Badan Pangan Nasional itu seperti apa, Pak? karena bagi saya ideologinya Badan Pangan Nasional itu tidak mengarah kepada kedaulatan dan kemandirian. Rapat pertama kami, Pak, itu tanggal 16 November 2022 dan hari ini tanggal 4 April 2023, kesimpulan saya, Pak, prestasinya Badan Pangan Nasional itu melakukan dua kali impor, buat surat edaran pertama direvisi menjadi Peraturan Badan yang semuanya rekomendasinya adalah impor. Saya pingin tanya koordinasi diskursus antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pangan Nasional ini seperti apa, Pak, ya.

Bicara hulu, ini kan bicara otoritas ada di Kementerian Pertanian bagaimana bicara soal produksi. Selama ini data yang kami dengar, kami saksikan dari Kementerian Pertanian selalu bicara surplus tetapi ujungnya kebijakannya adalah impor. Saya ingin tanya kepada Kementerian Pertanian. Bapak-Bapak, mereka ini, itu yakin betul tidak data yang Bapak mereka pegang ini objektif, valid dan akurat. Kalau Bapak, mereka yakin, Bapak, mereka ini berani pasang badan berani tarung data atau tidak karena terus terang Badan Pangan Nasional itu ada karena ada Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Pangan, itu DNA-nya adalah kedaulatan dan kemandirian pangan.

*Nah*, kita sudah bicara Badan Pangan Nasional ini menjadi konduktor yang mengorkestrasikan semua lembaga dan pangan nasional yang dituntun oleh nafas ideologinya itu kemandirian dan kedaulatan. Kemarin kami diskusi, Pak, Badan Pangan Nasional itu buat *road map* sampai tahun 2045 tujuannya adalah ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan berarti tekanannya semata-mata pada ketersediaan, semata-mata mungkin yang penting barang ada tidak peduli impor dan kalau impor terus-menerus itu bunuh petani kan begitu. Maka tolong, Pak, kami ingin tahu berapa kali Bapak, mereka ini berdiskusi dengan Badan Pangan Nasional ya komplikasi-komplikasinya itu, ketegangan-ketegangannya tuh pada level apa saja, Pak. Itu yang pertama.

Yang kedua, Direktorat Jenderal Perkebunan. Pak Andi kata kuncinya itu tadi kalau kita bicara perkebunan satu peremajaan, beberapa komoditi perkebunan yang sudah dianggap cukup tua, mau kopi, mau cokelat ya jambu mente dan lain-lain. Yang kedua, menghasilkan bibit yang unggul, Pak. *Nah*, ini tolong terus diperkuat, Pak. Saya pingin tahu juga perkembangan mengenai Program Sagunesia, Pak sebagai bagian dari diversifikasi pangan, itu ceritanya sudah sampai di mana, Pak. Yang berikut sampai hari ini 4 April, kami belum mendapatkan gambaran yang konkret menyangkut program kerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang terkait dengan pemberdayaan petani perkebunan, Pak. Kami belum mendapat gambaran soal itu, Pak. Kalau dibandingkan dengan Hortikultura, PSP dan lain-lain kami sudah melihat lebih terang, Pak. Mohon penjelasan dari Pak Andi.

Yang berikut Pak Nasrullah, Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan ya Kesehatan PKH/Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pertama, saya terima kasih apresiasi dulu pak sertifikasi menyangkut virus brucellosis untuk sapi di NTT setelah kita bicara sudah keluar. Terima kasih, kerja baik, Pak. Yang kedua, Pak, kami mencatat itu terkait dengan PMK per Februari itu masih ada di angka 5.700 ekor. Vaksinasi sekarang masih pada skala prosentase 25%, Pak, dari seluruh populasi artinya ini masih relatif jauh. Betul PMK sudah menurun drastis tapi PMK ini masih ada. Dengan demikian ada kebutuhan Pak untuk meningkatkan jumlah prosentase vaksinasi dan perluasannya ini, perlu ada akselerasi dalam melakukan vaksinasi ini, Pak, dan tolong tetap perketat kegiatan perkarantinaan di wilayah-wilayah perbatasan dan aspek biosecurity, Pak. Yang berikut, Pak, NTT itu penghasil sapi dan zona hijau, Pak. Zona hijau itu layak tidak, Pak, dapat apresiasi, Pak. Saya ulangi. NTT berhasil mempertahankan status sebagai zona hijau dalam PMK itu layak tidak, Pak, kami ini dapat apresiasi, berupa apa? kontribusi finansial supaya para peternak kami itu tetap menjaga betul zona ini tetap hijau.

Yang terakhir PKH masih, Pak, tolong pak perlu juga ada alat-alat pembuatan pakan buat para peternak rakyat kita ini ya sebagai upaya untuk memberdayakan sumber-sumber pakan yang ada, Pak, dan tolong dilatih juga supaya ini bisa mengurangi perlahan namun pasti, mengurangi ketergantungan kita pada pakan. Yang terakhir masih terkait dengan PKH. Pak, di Flores itu sudah puluhan tahun ada rabies pak. rabies itu sinosis, penyakit yang menimpa hewan tapi bisa menular ke manusia dan saudara-saudara saya banyak yang mati, Pak, dan targetnya itu 2030 akan hilang itu targetnya Kementerian Pertanian, rabies dari NTT. Kerjanya seperti apa, Pak? keberpihakannya kira-kira seperti apa, Pak? alokasi anggarannya bagaimana, Pak? Belum cukup terang benderang terkait dengan hal itu.

Yang berikut, Pak Dedi, Prof Dedi. Saya menambahkan sedikit terkait dengan yang tadi ditanyakan oleh Pak Ketua soal magang ke Taiwan dan Jepang itu, Pak. itu mekanisme rekrutmennya seperti apa, Pak? kualifikasinya bagaimana, Pak? Setelah mereka magang, pulang, apa yang mereka akan lakukan di wilayah mereka masing-masing, Pak?

Ya, untuk sementara itu saja.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Baik.

Terima kasih.

Bapak-Ibu sekalian,

Sebelum ke para Anggota, saya tadi sebenarnya mau menekankan juga tentang kinerja Pak Irjen. Belum pernah kita mendapatkan paparan tentang capaian kinerjanya seperti apa. Melakukan apa dan apa yang ditemukan, *improvement*-nya yang sudah dilakukan itu apa itu belum pernah. Pernah *enggak* Bapak-Ibu mendengarkan yang sudah dilakukan oleh Pak Irjen ini. Saya belum pernah mendengar, mungkin saya pas *enggak* ada, kalau pas di pas mendengarkan mungkin ya saya *husnudzon* saja tetapi biasanya paparannya seperti tadi anggarannya sekian untuk sekian ini. Jadi apa yang dilakukan itu belum kita belum mendengar, Pak, dan tolong ini dipaparkan di kita ya di apa yang sudah dilakukan itu apa, kinerjanya seperti apa.

Catatan dari Pak Ansi tadi menarik sekali untuk didalami meskipun tadi Pak Ketua sudah pendalaman yang luar biasa ke beberapa Dirjen sudah banyak. Ya, *over*, sudah banyak sekali. *Nah*, hal lain yang sempat kemarin kita hari Senin ya kita rapat dengan Bapanas, banyak sekali hal yang memang kita sangat kecewa. Bahkan, kemudian rapat kebetulan saya juga yang memimpin, kita rapat kita hentikan untuk bicara itu karena *enggak* jelas mereka. Pertanyaan Pak Ansi tentang komunikasinya seperti apa, itu penting sekali untuk dilakukan Pak Sekjen karena seorang kebetulan bukan kepalanya yang menjawab, seorang sekretaris apa namanya Sestama ya, Sestama tidak bisa menjawab kalau menurut saya. Tujuan dari dibentuknya Bapanas itu apa itu tidak bisa menjawab.

Mungkin kita yang salah membaca undang-undangnya atau dianya yang memang *enggak* tahu bagaimana cara membaca undang-undang itu karena cita-citanya hanya bertahan saja, tidak berdaulat, tidak mandiri. Jauh seperti apa yang kita harapkan, jauh seperti apa yang sudah selama ini kita diskusikan sangat jauh sekali. Oleh karena itu, itu kan Bapanas dengan Kementerian Pertanian kan seharusnya sangat dekat sekali. Ini sama-sama pemerintah ya untuk sama-sama pemerintah kenapa tidak ada koordinasi, cita-citanya *kok* berbeda begitu. Itu saja nanti Pak Irjen tolong diberikan gambaran kepada kami apa yang sudah dilakukan.

Selanjutnya Pak TA Khalid, silakan.

**F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ibu Pimpinan, teman-teman Komisi IV yang saya banggakan,  
Para Eselon I Kementerian Pertanian yang saya banggakan,

Izinkan, Bu Ketua, saya menyampaikan beberapa pertanyaan tanggapan dari Fraksi Partai Gerindra yang telah dikumpulkan ada 22 pertanyaan tetapi mengingat waktu yang terbatas, saya mungkin hanya membacakan beberapa hal saja nanti saya serahkan untuk dijawab.

Yang pertama, berdasarkan uraian kegiatan utama di Sekretariat Jenderal Pertanian tahun 2023 yang melakukan koordinasi dan kerja sama luar negeri di bidang pangan dan pertanian. Maka dalam hal ini, Pak Sekjen, kami, Fraksi Partai Gerindra ingin mendengar penjelasan terhadap kegiatan kerja sama tersebut karena kita tidak ingin terulang seperti pengalaman kemarin di saat kita mendapatkan sertifikat penghargaan surplus beras seminggu kemudian kita malah impor beras. Apakah kerja sama seperti itu yang diinginkan, di sini kami perlu penjelasan.

Yang kedua, juga di masih di sekretariat di Sekretariat Jenderal Pertanian terhadap pengembangan sistem pengelolaan data. Ini ada kegiatannya pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi pertanian. Kami ingin mendengar penjelasannya karena kan hampir setiap rapat kita bermasalah dengan data tetapi kegiatannya ada anggaran tentang pengelolaan data. Kami ingin mendengar anggarannya ada tetapi datanya tidak pernah... tidak pernah sinkron begitu. Kemudian menyangkut dengan Pak Irjen tadi beberapa teman Pak Ansi, Bu Ketua telah sampaikan, saya sebenarnya ingin menyampaikan kami, Fraksi Gerindra juga ingin menyampaikan hal yang sama. Saya tidak melanjutkan lagi tapi ini mohon maaf Pak Irjen sebenarnya banyak hal sebelum sampai ke kita ini Pak Irjen dulu sebenarnya tetapi ini mohon untuk ke depan agar lebih lebih optimal lah.

Kemudian Pak Sekjen beserta teman-teman dari kementerian, kita mungkin berulang kali telah menyampaikan terhadap isu terkini tentang sempitnya lahan pertanian akibat beralih fungsi ke lahan pemukiman. Ini apa langkah-langkah apa kami juga ingin mendengar, langkah-langkah apa saja yang ingin dilakukan yang ada akan dilakukan dan sedang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terhadap akibat beralihnya lahan pertanian menjadi lahan pemukiman.

Kemudian Pak Horti, Pak Dirjen Horti saya melihat bahwa ada kegiatan program model *farm*, model *smart farming* itu 20 paket. Kami, Fraksi Gerindra ingin meminta penjelasan di mana saja rencana pelaksanaan itu dan apa dampak efeknya karena anggarannya itu sampai 8 miliar per paket dan kegiatannya 20 paket. Ke mana saja itu tidak masuk pun skema aspirasi dan kemudian ini pada kesempatan ini izin kami sampaikan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan di Dirjen lainnya yang tidak masuk skema aspirasi. Kami juga harus mendapat perhatian kita semua penjelasan kepada kami terhadap kegiatan tersebut.

Kemudian menyangkut dengan asuransi. Kami, Fraksi Gerindra menyangkan asuransi pertanian masih terblokir dalam *automatic adjustment*.

Semoga Pak Dirjen ini lebih diutamakan lah karena ini asuransi, oke. Kemudian yang terakhir menyangkut dengan penyuluh, Pak. *Nah*, ini belum mendapat jaminan peningkatan kesejahteraannya, ini mohon perhatian lah, kita sudah berulang kali kita sampaikan tentang nasib penyuluh di sini. Kita selalu membanggakan mereka sudahlah kita sudah cukup beretorika, berkamufase mengatakan sayang dan iba kalau kita tidak dukung dengan anggaran kesejahteraannya. Ini mohon perhatian kita semua.

Kemudian, terima kasih Pak Dirjen BUN terhadap langkah cepat kemarin terhadap dikirimnya timnya ke Aceh Selatan. Sebenarnya Aceh Selatan itu Dapilnya sahabat saya, Pak Salim Fakhry, kebetulan saya lewat ke sana. Aceh Selatan itu memang dari Belanda. Masa Belanda itu daerah sentranya pala, Pak tapi kemarin memang diserang hama yang luar biasa sudah 5 tahun, 10 tahun sudah ini mungkin, Pak, kalau bisa di sana harus ada UPT Pala, Pak, karena memang dari zaman Belanda andalan pala terbaik di Aceh ada di Aceh Selatan. Jadi jangan... kasarnya begini, waktu masa Belanda masyarakat pala di Aceh Selatan, sejahtera. Jangan di saat merdeka masyarakat Aceh Selatan masyarakat pala Aceh Selatan, menderita. Jadi, jangan nanti masyarakat menilai lebih enak zaman Belanda dengan zaman merdeka. Ini mohon perhatian kita semua.

Hanya ini yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Oh sedikit, Pak. Tadi pagi kita mendapat informasi terhadap sapi seribu desa. Saya pernah menanyakan kepada Pak Dirjen dulu katanya tidak jadi dilaksanakan tapi tiba-tiba ada muncul dan saya ingin mendapat penjelasan terhadap sapi seribu desa itu. Desa seribu sapi karena begini terbalik-balik terus. Awalnya *enggak* ada kemudian muncul, memang kita harus terbalik-balik juga. Sekali lagi sapi seribu desa.

Terima kasih, kami perlu mendapat penjelasan.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Baik.n

Nanti Pak Dirjen ya dijelaskan desa seribu sapi bukan sapi seribu desa, kebalik bagaimana desanya seribu bayangkan saja.

Silakan Pak Suhardi Duka.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

Om swastiastu,  
Namo buddhaya.

Yang saya hormati Pimpinan, Pak Sekjen, teman-teman sekalian, serta  
Hadirin sekalian yang berbahagia,

Tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kata Kepala Badan Pangan bahwa untuk menetapkan harga HPP gabah dan beras itu, itu berdasarkan dengan persetujuan Kementerian Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan ya. Kalau betul itu berarti sama bodohnya Bapak dengan Pak Bapanas ini, 12.000 harganya beras Bapak tentukan 4.600 gabah, iya. Ternyata bukan hanya Badan Pangan Nasional bodoh, Bapak juga bodoh. Ini hajat hidup orang banyak, Pak, jadi kita harus bicara yang bagus. Kita menetapkan kebijakan yang bagus, itu yang pertama.

Yang kedua, ya malas kita ini sudah berapa kali kita bicara *automatic adjustment*, *automatic adjustment* terus. Kapan selesai ini *automatic adjustment*. *Automatic adjustment* terus dan kita sepakati *automatic adjustment* ini tidak mengganggu program yang langsung ke kebutuhan masyarakat itulah kesepakatan kita tapi ini dibohongi lagi, Pimpinan. Bohong lagi kita ini, justru yang sangat penting dikurangi, yang tidak penting ditambahi. Jagung kemarin kan 1.500, Pak Wandu, sekarang 900, bagaimana caranya ini. Ada yang naik 300% pengadaan apa ini... penyediaan... pengendalian hama naik 300% yang kemarin tidak ada. Kedelai naik dua kali lipat, jagung dikasih turun. Sedangkan ini jagung ini adalah sangat penting, Pak. Targetnya tetap 23 juta tapi anggarannya diturunkan. Saya minta ini Pimpinan direka kembali sama dengan tahun lalu, kalau tidak saya keluar dari ruangan ini. Buat apa kita rapat-rapat terus, iya puasa tapi kalau begitu terus caranya *ndak* benar. Iya itu yang kedua. Dipercepat saja supaya puas cepat kita buka ini.

Yang ketiga, data kita persoalkan, ya statistiklah. Statistik itu dijamin undang-undang, di sana itu ahli-ahli profesor itu. Tidak mampu kita mau melawan data statistik apalagi apa keahlianmu ingin melawan data statistik ini. Indonesia kita tahu 18 juta eh 180 juta wajib pilih, siapa yang akan memilih partai ini, siapa yang memilih orang ini hanya menyampe hanya seribu orang kita tahu, kita tahu. Seribu orang saja yang ditanya dengan sampel *random*, sampel itu oleh Badan Lembaga Survei seribu orang saja ditanya juga tahu bahwa PDIP mohon maaf ya PDIP 23%, Demokrat 9% iya. Bapak menang, saya kalah. Data survei, kita percaya ini, Pak ya. Statistik memang punya keahlian di situ, tidak usah dibantah datanya. Bapak tidak punya kemampuan membantah datanya apalagi keahliannya Bapak, apa keahliannya Bapak mau membantah datanya statistik.

Menteri Keuangan tidak mampu begitu cerdasnya Sri Mulyani ya data ekonomi makro selalu berpegang pada statistik berapa pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani 2020 menetapkan 5,3% pertumbuhan ekonomi ya. Capaiannya hanya 2,1%, data statistik. Sri Mulyani tidak pernah ingin membantah datanya, berapa pertumbuhan ekonomi, berapa GDP, berapa angka kemiskinan. Baru kita di sini selalu berbicara data-data-data kemudian. Selalu pintar kita daripada statistik. Saya kira ini Pimpinan ya. Pak Wandu, saya minta Pak Wandu dijawab ini dulu, kalau tidak dijawab saya keluar dari ruangan ini ya. Apa kembali 1.500 ini atau tetap 900?

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Jawab dulu, Pak Wandu.

Silakan.

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

*Wah* dijawab dulu. Yang pertama HPP 4.600, kami *enggak* ikut Bapak sumpah, itu saja.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Bapanas bilang begitu di sini.

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Yang itu ikut rapat yang HPP angkanya Rp5.000,00 itu hadir itu ... hadir dari kami hadir tapi yang menetapkan SE Rp4.600,00 *enggak, enggak* hadir.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Yang Rp5.000,00 hadir ya?

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Hadir yang Rp5.000 dan keluar terakhir perbadan itu hadir.

Terima kasih.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Terus yang ini yang 900?

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Jagung 1.500

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Tetap ya?

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Oke, terima kasih, saya *ndak* keluar dari ruangan ini.



**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Yang ketiga, setuju data statistik BPS.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Ok, terima kasih.

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Memang pakai itu kami KSA/Kerangka Sampling Area)

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Pak Suhardi Duka *enggak* jadi keluar ya? Selesai, siap.

Baik.

Bang Salim silakan.

**F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Bu Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ibu Ketua yang penuh kesabaran di rapat pada bulan puasa ini,  
Teman-teman Eselon I dari Kementerian Pertanian,

Cukuplah dari awal agak-agak tinggi semua menjelang berbuka ini tensi sudah bisa kita turunkan. Tujuan kita Pak Sekjen tidak lain, tidak bukan Pak Sekjen agar semuanya apa yang sudah kita sepakat di awal, hendaknya itu yang kita tidak lanjut. Andaikan ada perubahan juga sesuai dengan sambutan ketua yang saya simak, dikoordinasikan kembali ke komisi. Tidak ada suatu permasalahan, tidak ada suatu perbedaan kalau duduk berdiskusi dengan pikiran yang tenang saya kira *Insyah Allah* solusi akan bisa kita cari.

Masalah BPSDM, tadi Kakak Ansi sudah bertanya juga masalah yang ke Taiwan. Pak Ketua katakan cuman saya bingung Profesor *enggak* ada data, Pak Sudin punya data. Di sini entah siapa yang paling hebat, entah siapa yang kurang paham. Faktanya Pak Sudin ada tadi rencananya mau 300 orang 350, tadi ada yang perlu kita simak rekrutmennya bagaimana, Pak. Kriteria orang berangkat itu yang bagaimana? apakah dari Maluku Utara ada ikut? itu yang kita maksud. Kami ini *enggak* banyak 54 kalau Lampung, orang Lampung, orang Lampung saja ikut itu pun Bapak *enggak* benar. Ini andaikan contoh, maaf Pak Sudin, maaf Pak Sudin bukan saya...

**KETUA RAPAT:**

Pak Salim kalau ngomong *to the point* saja. Orang dari provinsi mana yang paling banyak *enggak* usah sono sini sana sini bilang saja. Orang kampungnya dia yang paling banyak itu saja sudah.

**F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):**

Inilah yang perlu saya cari data, Ketua. Saya *enggak* ada mengumpulkan data seperti ketua akurat apa otentik semua. Kalau saya memang *enggak* ada cuman umpamanya kalau dari Aceh berapa, dari NTT berapa, Aceh kalau ada dua tolong koordinasikan Pak Khalid dan saya, kan itu yang perlu, sama ini berkaitan dengan sapi tadi. Ternyata setelah ditanya di ruangan Setkom Aceh ada, kita *enggak* tahu, Sumsel ada, Jawa Timur ada. Jawa Timur mungkin yang punya Ibu Pimpinan. *Enggak*, itu umpama itu boleh cuma saya kan menyampaikan *enggak* tegang, cuman ingat lah kayak TP berapa kali buat CPCL-CPCL sampai hari ini *enggak* ada realisasi. Maksud saya *enggak* usah saya omongkan di sini. Kalau soal, ya ada bantuan jagung buat CPCL-nya apa, sampai sekarang *enggak* ada, bantuan bibit padi *enggak* ada. Apakah selalu Pak Wandu, kita mesti berontak dulu. Ini yang orang berontak apa *enggak* dapat kan lebih makanya saya tuh lebih mau diam Pak Wandu cuman apa yang Bapak lakukan, apa yang Bapak perbuat, saya juga tidak pun seperti Pak Sudin se-per 10 Pak Sudin, saya paham.

Ada lagi hal-hal yang lain. Saya kira, Pak Ketua karena waktu juga sudah April, Pak Ketua ya mau lebaran sudah pasti lah lebaran semua. Ada hal-hal tadi apa yang belum di-*tek*-in apa nama-namanya cepat-cepat saja di-*tek*-in, ketua supaya kegiatan ini bisa berlangsung cepat kan. Ada Bimtek bisa cepat, ada yang dilelang, ada yang diklik bisa cepat cuman dilaporkan. Saya kira Pak Ketua ini fair, bukan di depan Ketua asal jujur. Tadi Pak Profesor kurang jujur tadi makanya segala data ada untuk Pak Ketua. Ini syukur Pak Suhardi Duka tidak keluar dari sini, Pak kan karena jawabannya ada argumen, Pak. Kita ini kan sering *enggak* paham, Pak.

Ada petani milenial yang mana milenial itu pun *enggak, enggak, enggak* tahu kita, Pak. Tadi saya bukan mengada-ngada Pak Profesor memang info yang tadi dari saya, saya sempat *enggak* enak sama Pak Sudin. Pak, Bapak katakan kan KUR, saya katakan untuk apa mengamuk-ngamuk kan bukan uang kementerian. Pak Profesor bilang memang uang KUR itu yang kita bagi. Ternyata ada simpang siur. Saya kira, Bu, ya kita ini *enggak* usah apalah *enggak* usah lagi tegang-tegang kali ibu yang perlu *real* saja. Patuh kita kepada Pimpinan, patuh kita kepada Ketua, saya kira *clear* semua asal jangan lain yang diomongkan, lain yang di data, Bu. Yang lalu sudahlah, Bu, mulai menit ini setelah saya bicara mari kita perbaiki semua agar sinkron antara Kementerian Pertanian dengan Komisi IV ini harus kita jaga.

Terima kasih, Bu.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Baik.

Terima kasih, Bang Salim.

Ini teman-teman Golkar *kok* bajunya putih semua ya.

**F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):**

Mau ada setelah masuk, izin, Bu setelah masuk Pak Firman mungkin ada apa, Bu.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Oh, ada sesuatu.

**F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):**

Restorasi mungkin kita ya.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Terserah *sih* teman-teman Nasdem *toh*.

Pak Abdullah Tuasikal. Silakan, restorasi katanya.

**F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):**

Yang saya hormati Bapak Ketua, Pimpinan, rekan-rekan Anggota Komisi IV, Yang saya hormati Pak Sekjen, Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian beserta jajarannya,

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Ini karena bulan puasa yang lain ini, miripnya ini berbeda tapi bukan dalam arti berbeda bukan dalam arti lain. Saya mewakili rekan-rekan Fraksi Partai Nasdem akan memberikan beberapa masukan pikiran pada rapat dengar pendapat di sore hari ini. Sebagai sebuah negara dengan corak agraris, ketersediaan pangan di Indonesia bukan berarti tanpa tantangan baik dari sisi penyediaan pasokan maupun pada sisi pemenuhan kebutuhan. Tentu saja peran Kementerian Pertanian diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan yang terjangkau bagi rakyat Indonesia.

Saat RDP dengan Badan Pangan Nasional kemarin, disampaikan data prognosa neraca pangan nasional 2023 di mana terdapat beberapa komoditas pertanian yang total ketersediaannya tidak mampu memenuhi kebutuhan tahunan dalam negeri di antaranya kedelai, bawang putih dan daging lembu serta terdapat beberapa komoditas yang masuk dalam perencanaan impor seperti beras, kedelai, bawang putih, daging lembu dan gula konsumsi.

Fraksi Partai Nasdem meminta hal tersebut untuk mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pertanian untuk secara bertahap mengoptimalkan produksi dalam negeri, apalagi salah satu kesimpulan rapat kerja bersama Menteri Pertanian berapa hari yang lalu adalah meminta program Kementerian Pertanian disusun dengan fokus dan terukur guna meningkatkan produksi serta produktivitas komoditas pertanian. Dari target produksi 2023 yang disampaikan dapat dilihat misalnya untuk kedelai target produksi 370.000 ton, sementara kebutuhan tahunan ke kita 2,7 juta ton atau bawang putih yang target produksinya 45,55 ribu ton, sementara kebutuhan tahunan 651,8 ribu ton.

Target produksi tersebut masih sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan tahunan kita sehingga pemenuhan selalu melalui impor. Kami memahami bahwa ketergantungan impor tidak bisa seketika dihentikan. Namun, perlu upaya bertahap untuk menekan ketergantungan tersebut. Untuk itu, Fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Pertanian untuk meningkatkan target produksi komoditas pertanian dengan memaksimalkan program di tiap Dirjen yang dapat memacu peningkatan dan produktivitas terutama untuk komoditas yang pemenuhan kebutuhannya masih tergantung dari impor.

Pak Sekjen, Pak Eselon I yang berbahagia,

Kita memiliki lahan yang sangat cukup luas. Kita memiliki potensi manusia yang sangat cukup banyak, bagaimana kita akan mengurangi impor. Untuk itu, menurut kami itu perlu kita klasifikasikan wilayah-wilayah komoditas seperti kalau padi otomatis di Pulau Jawa maupun Sulawesi begitu pun di Maluku kita memiliki lahan yang terbatas. Mungkin juga di Maluku Utara dan lain-lain. Lalu mau diapain lahan-lahan yang terbatas ini. Otomatis penyediaan Alsintan yang memadai dan cocok di daerah-daerah tersebut juga pupuk dan lain-lain tapi ada satu hal yang sangat cukup penting, itu bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat melalui bimbingan teknis.

Kami tahu bahwa bimbingan teknis sangat cukup penting tetapi inti dari bimbingan teknis, itu memberikan pembelajaran kepada masyarakat sesuai dengan profesi sebagai petani, peternak maupun yang lain-lain. Untuk itu, ini yang sangat cukup menarik tadi yang disampaikan oleh Badan Stabilisasi Instrumen Pertanian, terlihat di sini tadi disampaikan bahwa ada 25 miliar produksi benih bibit standar dan Bimtek. Kalau buat saya, ya ini pengalaman kita selama tiga tahun ini. Ini kita *enggak* mengerti benihnya seperti apa ya. Saya kira untuk jagung sudah memenuhi semua sudah memenuhi semua soal kualitas, ini kunci ada pada siapa yang ya mendapatkan kegiatan ini.

Untuk itu, karena buat saya Pak apa Kepala Badan, saya kira Bimtek silakan jalan tapi Bimtek yang berkualitas dan harapan kita, artinya harapan kita Bimtek jangan seperti Bimtek-Bimtek yang ada tapi Bimteknya memberikan pemahaman, memberikan materi sekaligus memberikan materi apa memberikan praktik dan jangan cuma satu hari dan Pak Ban mau kasih kita berapa kira-kira berapa orang yang berpotensi. Umpamanya contoh kalau kita di Maluku ya silakan saja mau di sawah kita datangkan ya orang-orang yang memiliki kemampuan ya. Diberi pelajaran dan praktik, jangan cuma satu hari, seminggu pun jadi ya yang penting berkualitas. Kalau jagung bagaimana juga kita menciptakan masyarakat bisa menciptakan benih yang

penting benihnya itu benih asal, jangan benihnya F1, F2 dan selanjutnya benih itu tetap F1. Bagaimana caranya Bimtek ini harus dia berkualitas.

Saya sepakat kalau benih yang ada pada Badan Standarisasi, perbanyak Bimteknya saja, perbanyak Bimteknya lalu perbanyak praktiknya, hasilnya itu adalah tanpa benih-benih yang lain tapi mereka mampu mandiri ya untuk menciptakan benih karena saya lihat begini ya contoh ya contoh saja. Kami mendapatkan yang namanya durian ya durian musang king dan montong lele. Pertanyaannya kalau masyarakat terima lalu tanam lalu kalau ada yang nakal pengawasnya kurang coba lima tahun kemudian bukan jadi musang king bukan jadi montong tapi dia jadi durian kampung ini saja. Untuk itu, saya kira kegiatan ini kita mendorong dan memberikan apresiasi karena perencanaan yang ada di kementerian, saya kira sudah tepat karena ini mungkin dana yang kurang saja. Dana kurang mengakibatkan kita klasifikasikan lalu kegiatan-kegiatan, saya kira untuk memenuhi sasaran ya, saya kira agak masih agak cukup berat ya ini kan tergantung dari pemerintah mau *enggak* Kementerian Pertanian ini jalan. Kalau seperti ini kita kan ngotot terlalu ngotot-ngotot. kita mau tapi anggarannya *enggak* ada mau buat apa.

Untuk itu, saya mengharapkan saya memberikan apresiasi dan usulan saya itu bukan saya tapi kunci ada di Kepala Badan. Setelah 25 miliar selesai harus menjamin bahwa setiap daerah yang memberikan bimbingan teknis dan praktik itu bisa menciptakan benih sendiri. Di sana itu banyak kalau cabai ya kalau mau cabai *enggak* usah kita merek apa merek apa, cabai lokal itu sangat cukup bagus ya. Mungkin Pak Dirjen Tanaman Pangan mungkin soal apa, soal jagung saja ini saya kira di sana saja, Pak, di Bimtek kasih saja yang jagung yang F1 *enggak* usah kasih banyak-banyaklah karena apa? jagung yang bagus tapi kualitas sumber daya manusia tidak bagus itu juga sama saja. Yang kita nyalahin adalah Dirjen bahwa ini kan soal masalah cuaca masalah kepedulian masyarakat yang mau tanam ya saya kira itu. Saya memberikan apresiasi.

Lalu yang satu lagi untuk perkebunan. Saya kira cukup banyak kita sudah diberi sangat cukup banyak, ya mulai dari ada yang dari cengkeh dari pala tapi saya kira ada satu yang kita harapkan *enggak* ada tambahannya yaitu sagu. Saya *enggak* tahu kalau sagu ini pasca panennya pasca panen ini harus ada ya parut ada parut kelapa yang dulu kan untuk, untuk itu kecil-kecil saja biar minimal kalau mau mereka mau ekspor ke luar memang agak susah tapi minimal untuk kebutuhan rumah tangga ya, Pak, atau mungkin di sana juga saya kira kopi itu juga ditingkatkan dan kita mulai karena kita punya potensi dan sampai sekarang kita belum diberikan ya berikan benih maupun alat untuk kelanjutan itu.

Jadi saya kira itu saja Ibu... Ibu Ketua ini... Ibu Ketua ini... Ibu Ketua, *Assalamualaikum*.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

*Walaikumsalam*.

Saya dengerin dari tadi, Pak.

**F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):**

Saya tadi Bu Ketua tinggal makanya oh berarti Ibu Ketua sepaham dengan saya ini. Ini saya cuma tanya tadi Bu Ketua Bimteknya itu dikualitaskan hanya itu saja. Kenapa saya, saya itu kadang kala ikut Bimtek tapi kalau Bimtek ini kan sama dengan orang ceramah lalu orang tidur mengantuk sudah tapi kalau praktik kan orang mengerti dan semangat.

Saya kira itu saja, Ibu Ketua.

Terima kasih atas perhatian, Ibu Ketua dan ini tidak dibatasi waktu. Saya ucapkan terima kasih.

Saya kira demikian.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

*Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Pak Abdullah Tuasikal.

Saya pikir ini nanti kembali ke Bapak, Bapak Eselon I semua karena *enggak* ada ibunya jadi Bapak-Bapak semua.

Pak Firman *enggak* ada, Pak Ravindra, silakan.

**F-PG (RAVINDRA AIRLANGGA, M.S.):**

Izin.

Pada tanggal 15 Maret 2023 Kemenpan RB menerbitkan surat B521MSM01002023 di mana Kemenpan RB menghimbau instansi daerah untuk memprioritaskan pengangkatan P3K di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Jadi kami meminta agar Kementan berkomunikasi dengan PANRB agar juga menghimbau bahwa bidang pertanian juga tolong diprioritaskan pengangkatannya karena surat himbauan ini disebarakan ke seluruh instansi daerah.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Baik.

Terima kasih.

Saya pikir sudah semua ya Bapak-Ibu.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Ketua.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Pak Hermanto dulu, Pak Andi lalu Pak Hanan. Silakan.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Ya, terima kasih, Bu Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Saya ingin melihat sisi bagaimana program-program ini bisa membawa kebermanfaatan yang lebih kepada penerima program. Misalnya begini program-program yang berazas masyarakat misalnya peternakan ini, kami minta supaya ke depannya itu adalah bantuan itu adalah jangan sampai ternak-ternak yang tidak memenuhi kriteria tidak memenuhi standar. Jangan sampai misalnya peternak itu menerima apakah itu sapi dengan ukuran yang tidak sesuai dengan standar ataupun kambing yang diberi bantuan 25 ekor tapi berapa hari kemudian sakit dan mati hanya sisa tinggal 5 ekor. Kemudian juga dengan ayam, ayam itu banyak sekali keluhannya, 500 ekor per kelompok dibantu tapi 500 ekornya itu juga mati. Jadi ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita karena itu anggaran yang mestinya dalam perspektif pembangunan ekonomi bantuan itu kan ada dampak pengelolaan ekonominya. Oleh karena itu, kita menganggap bahwa semua bantuan itu bukan hanya dalam perspektif oleh penerima itu sebagai bantuan yang untuk dihabisi bukan. Itu juga harus diberikan pemahaman bahwa bantuan ini harus ditumbuhkembangkan. Tentu ini harus didukung dengan bantuan itu harus berkualitas. Kalau misalnya tadi seperti kesalahannya tadi itu ya *enggak* bakalan dapat apa-apa petani peternak itu, itu satu ya.

Yang kedua, terkait dengan Alsintan. Jadi Alsintan ini kan sudah banyak di kita ini ya. Ada yang baru, ada yang mereknya beraneka ragam ya kan, ada yang kualitasnya bisa dipakai berkali-kali, ada yang cuma sekali pakai. Kemudian juga ada yang *sparepart*-nya tidak tersedia begitu. Beberapa waktu lalu kita sudah ada gagasan tentang bengkel berjalan. Saya pikir ini harus kita tumbuhkembangkan untuk mengatasi ini supaya Alsintan-Alsintan yang sudah *sparepart*-nya tidak ada ya kan, kemudian juga teknisnya juga tidak ada di situ, ini saling membantu begitu. Di beberapa tempat sebelum lebaran itu Alsintan-Alsintan yang mesti, mestinya masih bisa dipakai begitu itu hanya karena satu komponen saja yang tidak bisa berfungsi, mereka *enggak* mau membetulkannya begitu akhirnya barang itu ya tinggal besi tua saja begitu. Saya minta juga ini supaya bengkel berjalan ini harus direalisasikan secara jelas begitu.

*Nah*, kemudian juga terkait dengan soal ya terkait dengan soal bagaimana kita harus PENAS ini. PENAS ini adalah merupakan tugas kita semua untuk memajukannya ini karena di sini adalah kepentingan bagaimana temuan teknologi

yang dikerjakan oleh anak bangsa itu harus kita support ya kan sebagai sebuah upaya kita bersama. *Nah*, saya melihat ini adalah bentuk keberhasilan kita semua di sini. Oleh karena itu, saya minta kementerian ini betul-betul serius di dalam PENAS ini sebagai sebuah upaya kita bersama begitu termasuk juga dukungan anggarannya. Saya pikir ini adalah penting itu.

Itu saja Bu Ketua yang perlu saya sampaikan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

*Waalaikumsalam.*

Pak Andi.

**F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):**

Terima kasih, pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan Anggota Komisi IV,  
Pak Sekjen dan para Dirjen yang saya hormati, Pak Irjen,

Saya singkat saja, Bu Ketua. Ini yang menggelitik kita kemarin ya rapat bersama dengan Bapanas kemudian juga dengan Bulog. Ini kan agak lucu ya karena dari target penyerapan dalam negeri itu kan 1,5 juta ton ya oleh Bulog. Terus Bapanas mengatakan 2,5 juta ton, tiba-tiba muncul lagi angka 2 juta ton untuk impor. Ini kan memang agak aneh ini karena sementara kan aturan sebenarnya bahwa cadangan beras pemerintah itu hanya 1,5 juta ton. Ini saja ini saja, Pak, kepada Pak Dirjen ini jelaskan juga pak ke bawah sebenarnya apakah memang beras kita ini ada atau tidak ada begitu kan. Sementara kalau kita merujuk daripada data BPS bahwa kita surplus, ini kan *enggak* ketemu-ketemu begitu. Jadi saya kira juga Kementan jangan diam juga, Pak, sampaikan juga ke publik dengan data yang ada. Jangan jadi bulan-bulanan seakan-akan bahwa Kementan ini *enggak* kerja ya kan. Dua juta itu angka yang sangat besar, Pak, 2018 dulu itu kita sudah menolak habis-habisan 2 juta ton tetapi impor ternyata *disposal* karena panen kita cukup. Ini mau terjadi lagi seperti itu kan apa gunanya cuma saya kemarin *enggak* sempat ini ya *enggak* sempat... Bapanas ini kalau hanya sekedar lebih fokus kepada hilirnya untuk apa ada Bapanas sementara petani di hulunya tidak perhatikan.

Jadi, Pak Dirjen atau Pak Sekjen ini, Pak, ya mungkin perlu juga mengajak Bapanas atau Bulog ini bagaimana sama-sama, Pak, menyerap gabahnya petani kita ini. Dulu waktu menteri yang lalu kan ada program apa namanya serap gabah, Pak, ya apa namanya dulu itu, Sergap ya. *Nah*, kira-kira bisa *enggak* di... di apa namanya coba di apalagi di... di apa dibangkitkan kembali sehingga tidak kasihan petani kita ini pada saat panen ini, ya siapa yang mau beli apa gabahnya mereka pada saat harga di bawah HPP. Ini masalah apa, Pak. Kita di Komisi IV ini *concern* dengan hulunya, Pak. Kita ya hilirnya itu urusan, urusan apa namanya komisi lain lah tapi kita di hulunya



ini petani kita ini harus harus sejahtera, Pak, dan kita harus percaya diri bahwa panen kita cukup ya kan. Kalau misalnya jadi masalahnya adalah ketidakmampuan penyerapan sebenarnya, ketidakmampuan penyerapan beras dalam negeri sehingga jalan pintasnya impor. Ini kan jadi masalah terus ini.

Saya sepakat dengan Pak Firman kemarin, Pak ya, kalau hanya impor begini ya tidak perlu orang pintar, Pak, cukup pengusaha saja sudah bisa. Jadi saya kira, Ketua, ini perlu perlu juga bagi kita, Komisi IV karena kan Komisi IV kita ini gagal bersama Kementan ini. Program-program kita ini ya tidak ada artinya kan ternyata kita impor terus. Ini saya kira menjadi catatan kritis juga bagi kita begitu ya. Oleh karena itu, saya pribadi dan Fraksi PKS menolak impor, Pak. Saya bagaimana menolak jumlahnya lagi gila lagi 2 juta ton ya kan, ini jumlah yang luar biasa dan apa namanya melemahkan daripada ketahanan pangan kita.

Itu saja ketua komentar dari saya.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

*Walaikumsalam.*

Kalau menurut paparan Bapanas, surplusnya itu cuman untuk 1,5 bulan tahun 2022 kalau tidak salah ya. Untuk April ini surplusnya 3 bulan atau sebulan ya itu yang kemudian ada pertimbangan untuk impor meskipun kita juga tidak setuju untuk impor.

Pak Hanan setelah itu Pak Firman.

**F-PG (Ir. HANAN A. ROZAK, M.S.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan Anggota Komisi IV, serta  
Pak Sekjen dan para Dirjen,  
Kepala Badan yang saya hormati Pak Irjen,

Pertama, terkait dengan PENAS. Saya kira dijelaskan saja Pak Kepala Badan, ini karena tidak mendapat penjelasan yang sejelas-jelasnya sehingga banyak pertanyaan. PENAS saja itu kan pekan, kalau pekan itu 7 hari pak kegiatan itu ya jadi harus dijelaskan dengan anggaran yang 15 miliar itu apa wajar apa tidak, itu pekan. Saya sendiri mengadakan kegiatan PEDDA (Pekan Daerah) di daerah pada saat saya kepala dinas hanya mengumpulkan seribu orang anggarannya bisa sampai 2 miliar bayangkan ya. Jadi saya kira dijelaskan saja untuk apa saja anggaran itu sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang mencurigakan dari Pimpinan tadi.

Kemudian yang kedua terkait dengan BSIP ini, Pak. Saya sangat memberikan apresiasi mulai operasionalnya BSIP ini, kemudian penyelamatan terhadap aset-aset yang selama ini sudah terbangun. *Nah*, tentunya dengan keberadaan BSIP ini harapan kita secepat-cepatnya bisa diketahui manfaatnya baik oleh instansi yang lain maupun oleh masyarakat. *Nah*, untuk itu terkait dengan lahan-lahan, potensi lahan yang ada, kebun-kebun induk yang ada, *nah* ini tolong menjadi perhatian. Jadi jangan seolah-olah kita ini memproduksi benih untuk disebar ke masyarakat, Pak. Yang namanya benih tugas memproduksi benih adalah perusahaan benih atau penangkar benih yang untuk disebar kepada masyarakat tani. Sedangkan yang namanya BPTP misalnya, eh BPTP namanya apanya, Pak sekarang. BSIP ya. BSIP itu tugasnya saya kira bukan menghasilkan benih-benih yang untuk disebar tetapi menghasilkan benih-benih yang ya benih pokok kalau dikenal dengan benih pokok *stock seed*. *Nah*, *stock seed* nanti disebar ke penangkar, penangkar baru menghasilkan benih sebar atau *certified seed* seperti itu. Saya kira ini harus polanya seperti itu. Jadi anggaran difokuskan untuk menghasilkan benih pokok bukan benih sebar, *nah* ini kalau terkait dengan tanaman pangan baik jagung, kedelai maupun padi.

*Nah*, kemudian kegiatan-kegiatan BSIP ini, saya harapkan untuk tahap tahun pertama ini operasionalnya BSIP, kami harapkan lebih banyak ke apa namanya memantapkan, Pak, sumber daya manusia baik ya minimal manfaat dari BSIP maupun apa namanya sarana-sarana persiapannya. Kalau kita akan memproduksi benih dan akan kita sebar tahun ini, Pak, itu perlu waktu, Pak. Kalau kita tanam misalnya di musim di gaduh ini ya mungkin di akhir tahun baru bisa tersebar benih ini. Oleh karena itu, tahap pertama ini saya pikir perbanyak saja dulu, Pak, Bimtek-Bimtek untuk penangkar benih ya, kemudian Bimtek-Bimtek untuk kawan-kawan kita yang mengelola instalasi-instalasi, *nah* sehingga ke depannya di tahun 2024 bisa lebih baik lagi apa namanya operasional dari BSIP.

Kemudian untuk yang lain-lainnya termasuk Dirjen Peternakan. Pak Dirjen fokus saya kira harus memberikan perhatian secara serius terkait dengan pembibitan, Pak, dengan apa namanya indukan, Pak, ya karena selama ini terus terang contoh kalau Pak Sudin bicara Lampung, saya juga bicara Lampung. Di Lampung katanya sentra ternak tetapi sentra sapi, sapi pedaging tapi kalau dilihat *feed lotter*. *Feed lotter* pangkalannya dari Australia. Kadang-kadang saya bertanya dikatakan swasembada yang mana yang berasal dari bakalan dalam negeri, ini bakalannya dari luar hampir sebagian besar dari luar negeri. *Nah*, oleh karena itu, kita harus mulai dari sekarang dan seterusnya. Kalau bicara soal swasembada daging ya pembibitan. Bagaimana kita bisa menyiapkan bibit-bibit sapi, bibit kerbau, bibit kambing yang yang unggul.

Saya kira ini, kemudian Pak Sekjen ke depan dalam penyusunan perencanaan anggaran dengan keterbatasan anggarannya alokasikan ke Kementerian Pertanian, fokus ke hal-hal yang tidak mampu dibiayai oleh masyarakat seperti contohnya untuk Alsin, Pak. Alsin itu sudah pas, perbaikan-perbaikan infrastruktur, pembangunan terstruktur sudah benar karena apa? itu tidak mungkin di dilakukan oleh masyarakat. Kemudian adanya teknologi-teknologi baru maupun apa namanya bibit-bibit yang unggul baru, itu saya kira tugas daripada pemerintah. Sedangkan untuk yang lain-lainnya ya pelaku pembangunan pertanian masyarakat tani tentunya mereka yang membiayai selagi kita masih terbatas anggaran yang dialokasikan ke Kementerian Pertanian.

Demikian bu.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Pak Her.... Pak Firman mohon maaf *kok* Pak Hermanto. Pak Firman.

**F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Baik.

Terima kasih, Bu Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati,  
Sahabat-sahabat saya Komisi IV yang saya hormati,  
Para mitra kerja Eselon I Kementerian Pertanian yang saya hormati,

Bu ketua, saya mohon maaf ketika Ibu presentasi, saya tidak hadir karena ada tugas di Baleg yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, kami telah mengucapkan selamat atas cumlaude-nya gelar doktornya.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Saya mungkin tidak akan membahas satu persatu dari direktorat atau di sub sektor masing-masing. Saya ingin membangun sebuah semangat saja bahwa filosofi di dalam sebuah negara, sebuah keberhasilan dalam program pemerintah itu tergantung baik buruknya daripada pembuat kebijakan. *Nah*, kita ini adalah sama-sama pembuat kebijakan. DPR telah membuat berbagai undang-undang yang sangat fundamental dari mulai Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, sampai sekarang lahan pertanian yang irigasi teknis di-alihfungsi-kan menjadi rumah sakit, pabrik dan lain sebagainya itu dibiarkan saja, tidak pernah ada tindakan proses hukum karena Kementerian Pertanian yang punya undang-undang sebagai pelaksana undang-undang tidak pernah melakukan upaya-upaya pencegahan itu, itu satu.

Dua, kita juga punya Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani. Ini juga semangat yang luar biasa dari Komisi IV ini. Terakhir yang dibidang undang-undang yang sangat revolusioner adalah Undang-Undang Pangan. Di dalam Undang-Undang Pangan itu jelas bahwa *spirit* dan semangatnya adalah pangan tersedia produksi dalam negeri karena tujuannya memang kita ingin memberdayakan petani kita yang 34 juta penduduk itu. *Nah*, oleh karena itu, bicara tentang regulasi, saya rasa sudah cukup bagus. Kemudian anggaran, saya tahun 2009 sebagai Wakil Komisi IV itu hanya 6 triliun, Bu Ketua. Sekarang Pimpinan sudah menyepakati sampai belasan triliun, 15 triliun kalau tidak salah. Saya 2009 sampai hari ini, visi misi Kementerian Pertanian tetap sama yaitu swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan tetapi dari anggaran yang sembilan sampai sekian belas triliun itu tidak pernah tercapai, artinya apa? ada *miss* manajemen di dalam pengelolaan pemerintahan di Kementerian Pertanian.

*Nah*, apakah ini tidak pernah dilakukan evaluasi secara bersama-sama. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, Bu Ketua, saya kemarin di Baleg sedang membahas yang namanya Revisi Undang-Undang Statistik. Kami gali satu persatu. Salah satu yang fokus kemarin itu adalah mengenai carut-marutnya data produksi pangan. Ternyata metodologinya ini juga dari BPS belum bisa diterima oleh logika. Oleh karena itu, tadi dilanjutkan lagi, kami juga usulkan agar Kementerian Pertanian juga diundang untuk data ini, karena kalau data ini tidak bisa dipertanggungjawabkan akurasinya mesti program apapun akan gagal karena perencanaan pembangunan itu diawali dari data yang benar. Kalau datanya carut-marut datanya amburadul ini mesti menghasilkan sebuah atau *output*-nya juga tidak akan seperti yang kita harapkan karena data itu menentukan sekali

Dan berikutnya, Pak, pemerintah saya dengar sudah menyusun Rancangan Undang-Undang RPJM. *Nah*, kalau datanya ini pun juga dari Bapak-Bapak produksinya juga tidak tepat, kemudian data-data lahannya juga tidak tepat, rata-rata atau *average* hasil produksinya dari lahan *enggak* tepat ini juga RPJM *enggak* ada gunanya mesti akan gagal lagi. *Failed* lagi, *failed* lagi begitu, *failed* lagi di situ. Ini mohon nanti Bapak-Bapak ditelaah.

Kemudian masalah pupuk, Pak, ini mohon dengan kartu tani yang konvensional saja sulitnya luar biasa. Hari ini, tadi siapa dapat WA dari daerah kelompok tani dikirim bagaimana mekanisme terhadap masalah digitalisasi untuk penebusan pupuk yang namanya subsidi. Dengan konvensional saja tidak bisa apalagi digitalisasi. *Nah*, mohon ini siapa yang bikin kebijakan mohon dirubah lah *mindset*-nya, jangan dianggap petani itu seperti kita-kita yang di Jakarta ini yang setiap hari mainannya *handphone* yang semuanya sudah menggunakan minimal adalah Apple yang 14 ya. Kalau di sana itu, Pak, petani itu *handphone*-nya masih kecil-kecil, Pak yang Nokia-Nokia itu yang buatan Cina itu yang penting bisa dipakai telepon istri di rumah, itu saja. Lah kalau ini digitalisasi, saya sangat kecewa kemarin saya terbatas waktunya dengan jawaban dari Direktur Pupuk Indonesia, Pak Ketua Pak Sudin. Saya tanyakan dasar menentukan digitalisasi itu apa. Katanya saya sudah melakukan survei semua mayoritas petani sudah menggunakan Android. Saya bilang Pak Direktur ayolah turun ke desa-desa sama saya, saya jamin keselamatannya. Jangan khawatir. Petani mana yang punya Android? *enggak* ada, Pak. Ini tolong, Pak pemerintah dari Kementan tolong dipantaulah kebijakan. Jangan jalan sendiri-sendiri, ini BUMN-nya jalan ke mana, pupuknya jalan ke mana, datanya ke mana *enggak* sinkron semua, Pak. Ini yang menimbulkan masalah besar tidak tercapainya daripada tujuan kita dan kemudian, Pak, ada lagi yang terkait harga bawah harga atas. Ini adalah *spirit* yang kita bangun ketika kita menyusun Undang-Undang Pangan. Kenapa ada harga, ada atas? ini filosofinya, Pak. Pak Sekjen harga bawah itu adalah bisa melindungi, memproteksi daripada petani kita dari harga keekonomisannya. Katakan harga bawang merah itu produksinya 14.000 per kilo. Oke, dipatok kasih untung 2.000 16.000, kalau harga terbawah itu petani sudah untung, Pak. Kan tidak salah kalau kita melindungi petani, rakyat kita *kok* dan kedua, harga bawah ini juga bisa mengatasi terhadap mungkin adanya *dumpling price* karena impor ini, Pak, yang sulit dikendalikan.

Pak Sudin yang terhormat,

Tadi kita diskusi mengenai impor. Sepengetahuan saya, Pak, kemarin ada pandemi, itu kita tidak impor kan aman-aman saja. Kenapa sekarang menjelang Pemilu *kok* hiruk pikuk semuanya impor. *Nah*, ini mungkin Pak Sudin yang bisa jawab bukan saya. Saya hanya kasih informasi karena selama beberapa periode di sini kami mencatat setiap menjelang Pemilu itu mesti ada impor besar-besar yang sulit dibendung dengan alasan apapun. Kemudian harga bawah itu tadi, Pak, saya sampaikan untuk mengatasi agar petani terlindungi dan tidak *dumpling*.

*Nah*, harga atas itu, Pak, itu adalah untuk menjaga daripada agar masyarakat itu memiliki rasa keadilan. Jangan sampai terjadi seperti minyak goreng, produksi CPO-nya melimpah karena tidak bisa diekspor tetapi minyak gorengnya itu harganya melejit, karena apa? tata kelolanya yang salah. *Nah*, ini tolong juga dipantau oleh Kementerian Pertanian sebagai produsen karena perkebunan ini kan produsen sawitnya. *Nah*, posisi-posisi ini, Pak, yang tentunya kita pikirkan bagaimana ke depan terhadap masalah persoalan-persoalan pangan kita.

Bapak-Bapak yang saya hormati,

Jumlah penduduk Indonesia itu diperkirakan 2030 rilis Bappenas sudah 300 juta penduduk. Bahkan, PBB menilai 2050, 9 miliar. Kebutuhan pangan pokok kita ini, ini meningkat terus. *Nah*, apakah dari Litbang yang ada di pertanian pernah *enggak* melakukan riset-riset untuk substitusi pangan. Katakanlah Pak Mindo selalu menyampaikan Mocaf, Mocaf itu bisa dipakai pengganti daripada mie. Kenapa *enggak* bikin regenerasi stop impor yang namanya gandum ganti Mocaf. Singkong kita di mana-mana, Pak Mindo itu sampai frustrasi, Pak, yang sudah 4-5 periode di sini kalau *enggak* salah, itu selalu menegaskan terobosan-terobosan yang luar biasa dan faktanya, Pak di Cina itu Mocaf ya dipakai untuk kepentingan konsumsi untuk kue dan sebagainya. Kenapa Indonesia ini malah *enggak*. Bahkan, bahan kertas saja di pabrik-pabrik itu impor dari Korea, untung Tuhan itu menghukum kapalnya tabrakan kemudian pecah di situ terbuka terbukti bahwa isinya gaplek. Produksi kita melimpah, Pak.

*Nah*, mohonlah Bapak-Bapak pembuat kebijakan ini jangan diam di situ, kasihan rakyat kita. Jadi ini yang kira-kira kami sampaikan, Pak. Mudah-mudahan dengan adanya rapat ini kita bisa terus memperbaiki terhadap kebijakan-kebijakan atau regulasi yang baru kita perbaiki. Ayolah kita menjunjung tinggi produk DPR ini, undang-undang kita buat bersama yang sangat bagus, kita jalankan secara konsisten dan konsekuen. Kita harus betul-betul mengendalikan impor ini, Pak. Kalau kita ketergantungan impor, saya khawatir kalau suatu saat terjadi pandemi seperti kemarin dan semua negara menutup distribusi produk atau bahan makanan dari negara-negara yang kita masukan dari negara lain, ini kita akan menjadi negara yang ketergantungan akhirnya menjadi krisis. Akibat krisis pangan itu, Pak, satu bisa menimbulkan inflasi juga bisa menimbulkan krisis ekonomi, krisis politik dan jatuhnya seorang rezim. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu, kalau itu terjadi maka kami, DPR ikut bertanggung jawab secara moral kepada rakyat Indonesia yang jumlahnya sudah 174 juta penduduk Indonesia. Jadi substitusi, Pak, itu tidak bisa ditawarkan lagi dan budaya atau membudayakan budaya makanan lokal itu juga dipertahankan kembali

yang terbiasa, ubi-ubi yang terbiasa jagung-jagung, yang terbiasa sagu-ragu, yang penting proteinnya. Jangan kita rubah semuanya harus makan beras.

*Nah*, impor ini, Pak, sekali lagi yang terakhir adalah kenapa impor ini tolong dikendalikan di daerah-daerah yang basis produksi penyangga pangan itu justru didrop beras dari impor, Pak. Ini menunjukkan bahwa lonceng kematian bagi petani sudah mulai ditabuh oleh negara kita yang notabene pangan adalah hak asasi manusia, pangan adalah amanat konsumsi sandang, pangan, tujuan negara tetapi negara sudah menabuh lonceng karena impor-impor didistribusikan di wilayah basis daripada produksi pangan nasional dan petani kita tinggal menunggu detik-detik kematiannya.

Demikian.

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam,*

Saya disuruh jawab sama Pak Firman, saya jawab karena Pak Firman dulu adalah Pimpinan saya. Kenapa Indonesia impor? ya itu impor itu dibahas oleh Ketua Umumnya Golkar, Ketua Umumnya Pak Firman di Rakortas. Jadi nanti kalau pas ketemu ketua umum tanyakan Pak Firman kenapa harus ada impor, Pak Ketum waktu Rakortas?

Yang kedua, tadi masalah Mocaf. Impor gandum itu bisa dikurangi bisa tetapi Mocaf itu hanya sebagai substitusi untuk mengurangi misalnya biasa pakai gandum, pakai tepung terigu 100%, mungkin hanya bisa di disubstitusi paling banyak antara 15 sampai 20%, Pak Firman. Kalau bicara diganti semua itu tidak mungkin.

Yang ketiga, pembuatan Mocaf itu lebih mahal dibandingkan pembuatan tepung tapioka, Pak Firman. Kalau tepung tapioka itu sudah jelas dikupas secara mekanisasi dikasih belerang agar racunnya hilang kemudian baru diperas baru diopen jadilah namanya tapioka beda dengan Mocaf, Pak Firman.

Ada lagi?

#### **F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Interupsi sedikit, Pak, karena menyinggung Pak Menko ini jadi tanggung jawab moral. Jadi Pak, Pak Menko ini memang betul memimpin rapat untuk menentukan daripada penting dan tidaknya impor karena memang negara itu kan punya tanggung jawab stok harus tersedia. Namun, kembali, Pak, di dalam rapat Kementerian Ekonomi itu kan pertama untuk menentukan itu ada *supporting data*...

**KETUA RAPAT:**

Neraca pangan namanya.

**F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

*Nah*, neraca pangan itu. *Nah*, neracanya itu *enggak* pernah beres, Pak. kasihan Pak Menteri saya, Pak, terus terang, Pak. Contoh kemarin pada waktu impor satu juta itu saya dipanggil, Pak. Dipanggil Pak Menko, Pak Firman tolong jelaskan kenapa ini *kok* DPR *enggak* itu, Pak. Di dalam Undang-Undang Pangan jelas, Pak, ada tiga indikator yang dipenuhi untuk impor: satu, Gagal panen, gejolak harga, stok tidak mencukupi. *Nah*, ketika itu stoknya Bulog itu kan ada gonjang-ganjing yang 500 ton hilang di Sulawesi itu, Pak, di Makassar sana itu yang sampai sekarang *enggak* jelas itu pengusutannya, Pak Sudin. *Nah*, kalau tiga indikator ini terpenuhi paling tidak kalau mau impor, Pak, bulan Juni, Pak. Ternyata beliau menyampaikan ke Presiden langsung malam itu beliau mengatakan Juni, itu pun kalau stoknya tidak mencukupi. Artinya apa? Menko itu hanya kebijakan itu pun harus *supporting* datanya benar. *Nah*, kalau *supporting* datanya main-main, Menko saya, Pak yang kejebak jadi bulan-bulan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Saya jelaskan di sini Pak Firman ya, yang nama Rakortas itu dihadiri dari beberapa kementerian antara lain Kementerian Pertanian, Perdagangan, Badan Pangan Nasional karena data... saya setiap rapat saya katakan data ini tidak pernah valid ya. Dikatakan oleh Dirjen Tanaman Pangan dengan mengirim bahan rapat Januari-April akan ada potensi, potensi *nih*, 13 juta ton tapi sampai hari ini wilayah-wilayahnya yang ditunjukkan belum bisa ditunjukkan. Bahkan, Presiden kemarin langsung memerintahkan apabila tidak cukup daripada 2, 3 kali Rakortas menghimbau akan mengimpor 2 juta ton, kalau *enggak* salah. Setelah 500.000 habis akan impor, akan tetapi belum, untuk memenuhi cadangan beras pemerintah yang mana Bulog itu saat ini posisinya ada 200.000 lebih ton. Maret, April, Mei, Juni selama tiga bulan akan disalurkan kurang lebih hampir hampir 700.000 ton beras kepada penerima masyarakat yang dianggap kurang mampu. Maka kemarin waktu rapat sama Bapanas, kami tanyakan berasnya dari mana, serapan lokal, ada *enggak* berasnya, itu *loh* Pak Firman, paham kan? Ini *loh* segala sesuatu *tuh* pasti yang namanya Rakortas itu semua pihak termasuk kedelai. Coban nanti tanya Dirjen PKH, jumlah populasi berapa, oh sekian juta ekor. Produksi untuk dipotong berapa, pasti *enggak* tahu. Seandainya tahu pun datanya belum tentu benar. Nyatanya Bulog dapat penugasan Pak Firman dari Rakortas tersebut daging kerbau kurang lebih 100.000, Berdikari dapat kuota impor daging sapi Brazil dan Meksiko hampir 50.000 berarti kan memang *kagak* cukup, ya Pak Firman jelas, *enggak* cukup, Pak. Jadi data ini belum tentu benar maka sekarang Wandu pakai ilmunya ilmu hebat. Dari dulu *kok* potensi, sekarang prediksi, yang akan datang mudah-mudahan produksinya sekian.

Ada lagi?

**F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):**

Pak Ketua, tadi saya.

**KETUA RAPAT:**

Ya, mbak itu dulu baru Mbak Alien.

**F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ketua yang saya hormati beserta Anggota,  
Pak Sekjen beserta para Dirjen dan jajaran,

Mungkin saya ingin menagih janji dari Dirjen Tanaman Pangan, Pak Ketua karena tempo hari kita pernah melakukan kunjungan di Kabupaten Serang ya dan bertemu juga dengan Bupati Serang kaitan dengan penugasan Kabupaten Serang untuk melakukan pengembangan perbenihan yaitu benih kedelai. Saat ini Pemerintah Kabupaten Serang ini sudah melakukan upaya penganggaran karena memang Pak Menteri juga sudah turun hadir, Pak Dirjen hadir, saya pun hadir, Pak Ketua juga sudah melakukan Kunspek juga akan tetapi saya melihat dari perencanaan anggaran yang disampaikan ini belum ada itu *action* dari Kementerian Pertanian untuk bisa mendukung ke arah perbenihan kedelai di Kabupaten Serang. Untuk itu, Pak Dirjen TP saya minta janji-janji tersebut penuhilah biar saya juga tidak malu kalau ketemu lagi rapat koordinasi dengan Ibu Bupati. Ini juga sebagai bentuk memberikan motivasi juga upaya penguatan kepada daerah, mereka sudah bersemangat tapi dari kementerian ini kayak yang kendor-kendor begitu.

Pak Ketua ini seperti apa saya juga minta bantuan dari Pak Ketua lah untuk bisa mengintervensi pada Dirjen TP agar bisa memasukkan program tersebut untuk prioritas di Kabupaten Serang, perbenihan kedelai di Kabupaten Serang yaitu jenis Migo. Paling tidak berikan saja alat pasca panennya Pak Dirjen supaya menghiburlah. Jangan sampai kita dianggapnya *hoaks nih* ketua kita sama-sama...

**KETUA RAPAT:**

Kalau pasca panen, kalau yang dipanennya itu *enggak* ada bagaimana?

**F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):**

Mungkin jenis apa ya modal alat mesin pertanian lah semacam itu.

Berikutnya dari Dirjen ini PKH. Kalau saya melihat ini anggaran kaitan dengan vaksin PMK, tadi yang pertanyaan Pak Ketua juga saya bertanya-tanya ini ,Pak Ketua karena ini ada layanan program pengendalian dan penanggulangan penyakit PMK. Ini terjadi blokir kurang lebih 369,2 miliar akan tetapi nih ya dari semula anggaran dan menjadi perubahannya ini, ini sangat berbeda sekali karena kalau dari sisi volume ini



jumlahnya sama 23.089 koma sekian akan tetapi dari sisi anggaran, ini *kok* mengalami penurunan ini seperti apa skema ataupun menyusun kegiatannya begitu. Terus evaluasi kemarin, Pak Dirjen PKH ternyata di kami pun masih saja itu masyarakat atau peternak yang tidak mengetahui adanya program pemberian vaksinasi untukantisipasi PMK kemarin. Ada saja masih peternak kita ternaknya yang mati kemarin itu karena informasinya kurang ataupun bentuk mungkin program diberikan ke daerah juga tidak diberikan secara masif. Ini evaluasi dari saya nih dan juga ini ada program kaitan benih ternak unggul BBPRT. Ini satuannya pakai dosis, jumlahnya fantastis ya 5.700.800 ini akan diberikannya ke mana begitu program-program ini. Apakah langsung ke peternak apa memang diolah sendiri oleh Dirjen PKH dan apa satuannya ini luar biasa bentuknya dosis, kami juga menghitungnya ini lumayan kerepotan.

Untuk yang lain seperti Dirjen Tanaman Pangan, Horti karena memang kita juga sulit untuk mengukur dari satuan-satuan yang dianggarkan oleh mereka, akhirnya yang terjadi target-target produksi juga hanya mengulang-mengulang yang lalu, Pak Ketua. Jadi ini juga perlu dievaluasi. Kalaupun kita mau menentukan targetnya misalkan sasaran disesuaikan dengan luas lahan, tentunya ini juga harus menyesuaikan jumlah volume perbenihan yang akan direncanakan, dianggarkan. Ini saya kira belum melihat ke arah sana, Pak Ketua. Jadi sebatas hanya menyusun anggaran hasil yang lalu-lalu dan terakhir untuk Dirjen Perkebunan kaitan pengembangan desa pertanian organik berbasis komunitas perkebunan 44 titik, maksudnya seperti apa. Apakah memang Dirjen Perkebunan juga akan melaksanakan fungsi peranannya untuk bisa melaksanakan kegiatan di sektor pertanian yang lain atau komoditas perkebunan seperti apa gitu 44 titik ini, mohon dijelaskan. Dan di PKH mohon maaf ada alat lab peternakan ini 55 ini ya unit *nih*. Ini apakah kalau saya meminta bahwa 55 unit ini diberikan kepada masing-masing Anggota sebagai program di aspirasi untuk kami.

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Saya hanya menanggapi masalah kedelai tadi yang konon katanya ini konon katanya, kata Dirjen Tanaman Pangan tinggi pohonnya 2 meter, betul *enggak* Pak Fadry waktu kita ngomong di mobil?

**KEPALA BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN:**

Ya, yang (*suara tidak jelas*), Pak yang...

**KETUA RAPAT:**

Yang di Serang. Tinggi pohonnya 2 meter betul?

**KEPALA BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN:**

Menurut Pak Dirjen, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Produksinya berapa menurut dia waktu itu, ada saksi sama saya bertiga di mobil.

**KEPALA BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN:**

Empat ton.

**KETUA RAPAT:**

Empat ton tapi kemarin kalau di berita ada yang bilang enam ton ada yang delapan ton. Jadi tergantung sumber yang ngomong, kalau yang ngomong si A bisa empat ton, ada yang enam ton, ada yang delapan ton. Kalau ditambahin traktor roda empatnya ya mungkin jadinya bisa 15 ton ya, itu loh. Kemarin saya kunjungan Pak Firman ke Dapilnya, Grobogan Dapilnya Pak Firman? Saya tanyakan sama Bupati, Bu Bupati Anda dapat tugas apa dari Dirjen Tanaman Pangan? kami ditugaskan menanam kedelai 50.000 hektar. Dapatnya apa bantuannya? sampai hari ini belum ada. Jadi Ibu jangan tanam. Harusnya kalau Anda memerintahkan seorang Bupati menanam 50.000 hektar, ini bibit saya kasih 50.000 hektar dan saya prioritaskan kepada Kementerian Pertanian untuk mendapatkan pupuk subsidi.

**F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):**

Ya, setuju itu, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Itu baru Anda jagoan, Bos. Kalau cuma menyuruh doang pakai modal ludah *kagak* bisa jalan. Prioritaskan dapat 50.000 hektar untuk khusus untuk kedelai tadi baru petani akan giat untuk menanam, karena apa? *alhamdulillah* bibitnya gratis, pupuknya subsidi bukan begitu Pak Firman, betul. *Nah*, kalau hanya *nyeroto* ya percuma itu saja.

Ya, Mbak Alien.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Terima kasih, Pimpinan karena sesungguhnya soal kedelai saya langsung saja di penganggaran kedelai. Di situ saya melihat kalau memang tidak bisa lagiantisipasi ini di bulan 4 waktu itu, Pak Ketua, saya pernah singgung. Sebenarnya waktu tanam kedelai itu di bulan berapa? awal tahun kah, pertengahan tahun kah atau akhir tahun. Kalau seandainya dia di awal tahun, berarti ini sudah terlambat, kalau dia di pertengahan tahun berarti ini belum terlambat, kalau di akhir tahun ya mungkin ini tidak terlambat dan hasil panennya sampai saat ini kan kita masih mempertanyakan. Pak Wandu kalau seandainya kedelai ini tidak bisa dan sangat minim untuk mencapai target, Pak Sekjen, saya harap dengan sangat kita masih *automatic adjustment* besar loh setiap Dirjen ini. Kalau memang Dirjen Tanaman Pangan kita bisa alihkan ke Dirjen Tanaman Pangan kegiatan yang lain seperti tadi disinggung oleh Pak... Pak Suhardi Duka jagung misalnya kita butuh, terus padi kita butuh, ya alihkan kan saja tapi

memang ini betul-betul mendukung kinerja tanaman pangan dan khususnya untuk penghasil pangan dan tadi sudah disinggung sama Pak Firman, kedaulatan pangan itu terutama salah satunya adalah beras ya, Pak Firman.

Kemudian kalau memang itu disepakati saya harap sih Pimpinan ini disepakati karena Pimpinan selalu menyinggung soal kedelai tersebut. Saya mau menyampaikan Pak Sekjen, mohon maaf kami Anggota DPR tidak bisa membahas satuan tiga. Data yang dipaparkan oleh Kementerian Pertanian tolong dengan sangat satuan tiganya tidak usah dilampirkan itu sesuai dengan aturan. Saya sudah sempat singgung pada Raker dan RDP waktu lalu dan ini yang kesekian kalinya. Ini ketua harus kita *keukeuhkan* bersama karena jangan sampai kita melanggar aturan.

Kemudian, saya melihat tadi sempat disinggung oleh rekan-rekan saya yang lain, Pak Sekjen, Pak Ketua, saya mohon dengan sanga,t ini tadi sempat disinggung Pak Ansi tentang dukungan manajemen di beberapa Eselon I. Saya berharap prioritas anggaran kalau memang kita betul-betul melihat kebutuhan penganggaran kita fokus kepada ketersediaan pangan, saya berharap agar bisa dilihat dan ditinjau kembali. Saya ingin menyampaikan kembali soal seribu sapi per desa, Seribu Desa Seribu Sapi. Memang itu masuk dalam sosial media dan itu disampaikan langsung Pak Dirjen, Pak Sekjen, kalau saya masih ingat persis kalau saya belum hilang ingatan kegiatan tersebut telah ditiadakan. Jangan sampai *quote by quote* ada unsur permainan tersendiri dan ini menjadi pertanyaan yang besar buat semua pihak.

**KETUA RAPAT:**

Tunggu.

Saya perpanjang dulu. Tadi kita bilang 16.30 WIB perpanjangan dulu sampai jam 17.30 WIB.

**(KETUK PALU 1 KALI)**

**F-PG (ALIEN MUS):**

Baik.

Terima kasih, ketua.

Kemudian tadi yang dipertanyakan soal PMK, terus terang saya melihat, Ketua, LSD ini sangat, sangat dibutuhkan ketua karena memang virus LSD ini *Lamb Skin Disease* ini kalau *enggak* salah itu sudah merajalela ke mana-mana. Kalau memang perlu atensi, atensi yang luar biasa. Kalau tidak ya tolong penganggarannya yang jelas. Kemudian tadi Kakak Ansi menyatakan bahwa PMK itu masih ada. Kita masih memiliki stok vaksin ketua, tadi kalau dibilang 34 juta. Bagaimana distribusi vaksin sampai saat ini. Terus diprioritaskan ke daerah-daerah mana saja sehingga Pak Dirjen memang untuk PMK ini sudah mulai turun tapi...

**KETUA RAPAT:**

Sebentar Mbak Alien. Habis dia ngomong sudah dipaparkan wilayah mana saja yang masih ada, ada *enggak* datanya. Ya lanjutkan.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Oke.

Kemudian saya tadi, Pak Ketua terima kasih banyak karena memang daerah saya adalah daerah perkebunan tapi bukan hanya daerah Maluku Utara saja. Kemarin saya meminta paparan dari Kementerian Pertanian soal hasil perkebunan di seluruh Indonesia per provinsi, per komoditi yang bisa didorong misalkan kalau daerah Timur rata-ratanya kita cengkeh, Ketua, kelapa, pala dan itu rata-rata kita juga bisa menyumbang hasil potensi tersebut tapi melihat lagi kebutuhan masing-masing, Pak Dirjen. Misalnya kalau di Kakak Sulaeman beliau meminta untuk sagu misalkan, terus di saya dan di Ibu Saadiah misalkan daerah kami benar-benar kita kalau dipaksakan untuk komoditi lain maksudnya pertanian, kita *enggak* bisa, Ketua, karena memang *main streaming*-nya adalah perkebunan. *Nah*, ini yang menjadi menjadi atensi, saya mohon dengan sangat atensilah dari pertanian.

Kemudian Karantina. Saya melihat kegiatan-kegiatan Karantina juga memang baik tapi mohon dengan sangat karena sumber masuk PMK itu juga kan dari Karantina. Terus sampai sekarang *nih*, Ketua kita kan belum mendapatkan lagi paparan *report* seperti yang kemarin. *Enggak, enggak* akan bakal, oke baik.

Kemudian kita juga berharap bahwa anggaran di 2023 ini cepat selesai, Ketua, karena ini sudah bulan April. Kalau memang *automatic adjustment* kita hilang tekan dan kita meminta untuk tidak lagi di apa namanya diberlakukan tolonglah dengan sangat kita diberikan kegiatan yang masuk akal dan kalau memang untuk dukungan manajemen per Eselon I, ini kan *automatic adjustment*, Pak Pak Sekjen. Kalau memang *automatic adjustment* kan bisa saja kan yang kegiatan langsung ke masyarakat kita pakai dulu Dukman-nya. Nanti kalau *automatic adjustment* dibuka dikembalikan lagi kalau misalkan seperti itu. Jadi menurut saya sekarang prioritasnya bagaimana kegiatan ini langsung ke masyarakat, langsung ke petani, langsung ke nilai tukar petaninya, itu yang saya harapkan.

Kemudian Pak Ketua, kami sudah diajak *briefing* dan untuk Pertanian, Bapanas, Bulog dan sebagai itu menjadi atensi kami karena memang betul Ratas bersama dan keputusan itu impor ada di Kementerian Perekonomian tapi data yang di-*support* dari semua kementerian lintas kementerian ini adalah data untuk memutuskan bagaimana impor apa tidak. Yang saya harapkan adalah jangan impor.

Itu saja, Ketua.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Semua Anggota Komisi IV tidak berharap ada impor tapi kalau data neraca pangannya *enggak* jelas bagaimana. Ada lagi? Pak Khalid? Sudah, sudah berantem sama Salim saling menuduh.

Ya, Sekjen silakan jawab.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Baik, Pak Ketua.

Bapak-Ibu sekalian,

Terima kasih.

Pertama, kami sampaikan berbagai arahan, masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV berkaitan dengan mulai dari perencanaan hingga implementasi kegiatan program di masing-masing Eselon I. Saya memulai dengan tadi ada beberapa pertanyaan kaitannya dengan koordinasi dengan Bapanas tadi Pak Ansi ya dan juga Pak Suhardi Duka. Kami melakukan beberapa hal, Pak, ya di antaranya adalah pada saat Bapanas biasa membuat prognosis neraca komoditas itu 12 bahan pokok itu, Pak, tentu yang bagian produksi ada di Kementerian Pertanian, yang mereka kerjakan kan ada kebersihan ada distribusi ada keamanan, keamanan pangan itu yang menjadi mereka apa lakukan tapi bagi kita juga adalah kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan hulu yang masih hulu itu, Pak, mereka selalu meminta kita. Katakanlah untuk data penyuluh misalnya dari (*suara tidak jelas*) artinya ada koordinasi kami dengan mereka.

Kemudian yang kaitannya dengan data nanti mungkin *to the point*, Pak Dirjen Tanaman Pangan yang berkaitan dengan beras bisa di lebih dielaborasi lebih detail. Kemudian yang kedua kaitannya perencanaan, terima kasih, Pak Pak Khalid dan Suhardi Duka tadi juga disampaikan supaya fokus kepada yang menerima manfaat besar kepada rakyat tentu kaitan terakhir dengan Bu Alien melihat kembali data dokumen apa dukungan manajemen untuk bisa ditransformasi ke dalam anggaran-anggaran yang sifatnya operasional. Utamanya di Dirjen teknis untuk meningkatkan produksi dan juga hal-hal lain yang kaitannya dengan yang dibutuhkan oleh rakyat.

Ini saya sampaikan terima kasih Bapak dan kami, Pak Khalid yang berkaitan dengan data juga ada kami Pusdatin/Pusat Data dan Informasi memang di situ melakukan beberapa analisis data-data dasarnya dari dari BPS, Bapak. Kemudian kita lakukan muncullah informasi itu, itu yang yang...

**KETUA RAPAT:**

*Sorry*, Pusdatin itu *collect* data dari penyuluh apa dari BPS?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Dari BPS, Bapak.

**KETUA RAPAT:**

BPS dari mana?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya, artinya dari daerah, dari daerah BPS pun begitu. BPS daerah, Pak, ada...

**KETUA RAPAT:**

BPS daerah dari mana kalau komoditas pertanian?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Betul. Artinya mereka bersinergi untuk *collect* data dari dinas dari penyuluh. Ya, dari situ, Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Coba Ansi terangkan. Kemarin saya sudah *briefing* dia untuk menjelaskan kepada Bapak-Bapak di sini data itu dari mana. Saya mau bicara Pusdatin mau forum saya *enggak* percaya sudah itu saja.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Ya. Pak Sekjen izin untuk Pimpinan. Yang kami mau mempertanyakan itu adalah metode pengambilan datanya *nih* data primernya ini dari mana. Apakah BPS yang sendiri melakukan proses pengambilan data atautah Kementerian Pertanian melalui perpanjangan tangannya dinas-dinas di daerah, metodologinya *nih* seperti apa begitu, Pak. Kalau tadi Pak Suhardi bicara soal untuk tahu elektabilitas terkait dengan partai-partai politik cukup ambil sampel, katakanlah 250 seribu itu terlalu banyak, itu kan berarti metodologinya harus benar. *Nah*, yang kami inginkan ujung tombak Kementerian Pertanian atau dinas untuk mengambil data di lapangan ini siapa, Pak, kan begitu dan metodenya yang dipakai apa atautah karena yang kami dengar, Pak, BPS ini mereka mengolah data bukan data primer, Pak. Data yang juga diterima dari dinas artinya data sekunder kan begitu.

*Nah*, jadi mungkin, Pak Ketua, ini hal-hal seperti ini kita perlu buat mungkin perlu ada agenda khusus ya yang bisa menjawab tentang model metodologi pengambilan data. Apakah di Kementerian Pertanian, apakah lewat mantri-mantri tani, apakah lewat penyuluh atau bagaimana begitu kan, Pak. *Nah*, nanti kaitannya tarikannya jauh lagi, Pak. Kita berharap penyuluh bekerja tetapi bagaimana misalnya dengan kompetensi penyuluh, bagaimana dengan kesejahteraan penyuluh dan seterusnya begitu, Pak.

Kami saja kalau mau melakukan pengambilan katakanlah sampel sistemnya ya, survei berarti sampel itu kan *researcher*-nya itu, itu kan perlu kita latih kita persiapkan sehingga kemudian pengambilan sampelnya itu kan tidak salah begitu. *Nah*, kalau di kaitan dengan ini, mungkin berarti bukan sampel ya, Pak, ya. Apakah sistemnya sensus terus bagaimana dengan yang istilahnya ubinan itu dan seterusnya begitu, Pak. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kami yang terus-menerus berputar-putar di kepala kami tapi kami belum bisa *firm* pengambilan datanya *nih* seperti apa begitu, Pak.

Demikian.

**KETUA RAPAT:**

Ya, lanjut.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Izin, Pak Ketua.

Pak Ansi betul sekali ada metodologi terakhir kerangka sampling area itu yang digunakan oleh BPS. Yang pertama adalah untuk produktivitas, kita, BPS ini BPS yang melakukan, tentu di lapangannya mereka ada punya mantri statistik dan juga ada mantri tani dan juga di situ penyuluh. *Nah*, oleh karena itu, yang produktivitas itu *sampling* untuk ubinan itu sekitar 220.000 *sampling* untuk mengukur produktivitas untuk beras misalnya ubinan itu, Pak Ansi, itu yang dilakukan oleh... itu yang kita pakai.

*Nah*, kemudian data luasannya, data luasannya itu berasal dari dinas. *Nah*, itu yang ya tentu metodenya sekarang menggunakan satelit, citra satelit ya untuk re-delineasi berapa luasannya. *Nah*, kalau ada data luasan dan juga produktivitas dari ubinan tadi maka kita mendapatkan data produksi, Pak, itu yang kira-kira secara secara ringkas berkaitan dengan metode.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Pimpinan, saya sedikit, Pimpinan.

Kalau kita berangkat dari cara berpikir kita tidak percaya, susah untuk kita percaya. Oke, saya juga tidak percaya data Kementerian Pertanian sama saya, Pak Ketua tapi saya percaya data statistik karena itu yang saya katakan tadi di undang-undang punya metodologi, punya sistem dan punya orang sampai ke tingkat daerah sampai ke kecamatan untuk data itu. Terus kita tidak mudah percaya data statistik, data apalagi yang mau kita percaya. Apakah Anda lebih pintar daripada data statistik, metodologimu tidak jelas, cara menghitungmu tidak jelas, tidak punya orang sampai ke tingkat daerah. Katakanlah Badan Pangan Nasional tidak punya sampai ke daerah hanya di Jakarta, terus mau menjanjikan data tidak menggunakan data statistik mana saya bisa percaya, *nah* ini.

Jadi menurut saya, tidak usah kita ribut-ribut, ambil data statistik karena kebijakan nasional juga menghitungnya mengambil dari data statistik. Berapa pertumbuhan ekonomi kita walaupun Kementerian Keuangan mengatakan 5% kalau saya sendiri mengatakan hanya 2%, 2% itu yang menjadi kebijakan nasional ya. Berapa tingkat pengangguran walaupun Pak Presiden mengatakan tingkat pengangguran 5% tapi statistik mengatakan 8%, ya 8% *enggak* bisa karena memang dia punya perangkat dia punya metodologi. Terus kamu bantah paparan kamu metodologimu, apa data bandingmu. Kau bisa bantah orang tapi lebih bagus *dong* kau punya data *dong*. Kau bisa katakan lebih punya produk tapi apa namanya produkmu tidak bagus tapi lebih bagus mendukung betul-betul lebih bagus tapi kalau tidak ada

kau hanya tidak percaya saja bagaimana caranya. Jadi kita akan kehabisan waktu di sini untuk saling tidak percaya saja untuk mengenai masalah data. Begitu, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Secara *de facto*, saya meragukan data BPS dan secara *de jure* dialah yang mempunyai data yang di melalui undang-undang. Ini saya tegaskan di sini. Contoh waktu bulan Desember, Pak Suhardi kan ikut rapat, tidak akan terjadi inflasi kalau kenaikan harganya sekian, nyatanya hari ini inflasi. Apa komoditasnya? ya beras yang awalnya cuman 84 sampai 85 kemudian hari ini hampir 10.500. Pertanyakan sama BPS, Anda datanya dari mana, tetap dari dinas. Apakah data dari dinas semua akurat? Saya tidak bicara dinas itu *enggak* bagus, *enggak*, iya kan. Contoh saja lah RDKK penyuluh suruh *collect* RDKK, kira-kira pendapat PSP bagaimana masalah RDKK Pak Ali Jamil, *copy paste* atau apa RDKK yang di-*collect* oleh penyuluh di lapangan sebagian besar.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Izin, Pak Ketua.

Itulah selalu maka kita *cross check* dengan Dukcapil, Pak. Jadi kita apa namanya isi (*suara tidak jelas*) kita itu terus terang sebenarnya (*suara tidak jelas*) itu memang ada juga yang di-*update* beberapa tahun sehingga pada saat kita *cross check*, Pak, dengan Dukcapil ya akan ketahuan memang yang mana nanti akan benar, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ada lagi Sekjen siapa lagi tadi yang mau menjawab, silakan.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Ketua. Jangan bandingkan data statistik dengan RDKK, saya juga tidak percaya RDKK ya tapi data statistik saya percaya.

**KETUA RAPAT:**

*Enggak* ini contohnya. Saya katakan Pak Suhardi contohnya. e-RDKK itu ya kan kan tidak ada pemutakhiran cuman *copy paste* kirim, *copy paste* kirim dan tidak dihitung seberapa banyak alih fungsi lahannya tetapi pupuk subsidiya tetap tidak turun. Contohnya Bekasi, Karawang, Cikampek, Purwakarta, 10 tahun lalu sampai sekarang paling E-RDKK-nya beda sedikit penurunannya tetapi alih fungsinya kita lihat luar biasa. Siapa lagi mau jawab Sekjen tadi waktunya sudah mau jam 17.00 WIB.



## DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Izin, Tanaman Pangan, Pak.

Menambahkan sedikit izin, Pak Ketua ya, KSA BPS. Melengkapi Bapak Sekjen supaya Pak Ansi juga dan Pak Suhardi Duka juga, izin. Jadi KSA BPS, KSA itu Kerangka *Sampling Area* ini merupakan metode yang dibikin dimulai tahun 2018, sebelumnya pakai metode *eye estimate*, izin, itu satu. Yang kedua, kerangka *sampling area* itu menggunakan teknologi sudah pakai satelit kerja sama LIPI sehingga populasinya atau luasan total yang di-cover itu luas baku sawah 7,4 juta hektar itu dipotret dengan satelit kemudian untuk melihat *ground check* detail satu persatu baik luas panen, fase tanaman vegetatif, generatif, masih bera bahkan termasuk yang potensi gagal panen begitu itu terpantau oleh satelit itu ada *sampling*-nya kerangka *sampling area*. *Sampling*-nya itu di 220-an titik di eh 220.000 titik itu dari 7,4 juta hektar itu, Bapak.

*Nah*, titik itu setiap bulan diamati oleh petugas. Petugasnya itu bukan petugas Dinas Pertanian bukan petugas lapangan dinas, bukan kami, dia independen dengan menugaskan di BPS itu ada BPS provinsi, ada BPS kabupaten, di kecamatan ada juga namanya petugasnya KSK/Kantor Statistik Kecamatan. *Nah*, itulah yang bertugas mengamati bulanan di 220.000 titik perkembangannya tiap bulan sehingga bisa ketemu eh di titik-titik itu yang diamati adalah berapa luas tanaman fase vegetatif, generatif, luas tanam yang panen, kemudian yang fase apa, sebentar supaya lebih detail ya ya. Yang bera, bero begitu kemudian ada juga yang masih persiapan lahan atau PR kemudian lainnya. Lainnya itu adalah lahan di luas baku di luar 7,4 yang ditanami di luar padi. *Nah*, di luar padi juga kecamatan namanya lain-lain.

*Nah*, setiap bulan diamati misalnya untuk sekarang bulan sekarang ini bulan Maret begitu ya jadi yang angka sudah final adalah Januari, Februari, Bapak dan sebelumnya. Kalau bulan April belum eh bulan Maret baru selesai mendata nanti akan keluar tanggal 20 sehingga disebut angka yang sudah realisasi terakhir itu Januari, Februari itu akan tetap. *Nah*, untuk angka prediksi atau perkiraan, Bapak tadi Pak Ketua, izin itu Maret, April sampai Mei itu namanya angka perkiraan berdasarkan potensi. Potensi itu apa? kalau diamati bulan mengecek lapangan selama sebulan-bulan Februari misalnya itu sudah angka tetap di bulan Februari itu berarti angka tetap untuk bulan Februari angka tetap sampai selesai akhir bulan Februari tetapi bisa memprediksi angka bulan Maret itu dari lihat yang sudah kuning-kuning atau generatif. Luasan yang kuning padi itu generatif itu untuk memprediksi panen Maret.

Kemudian untuk bulan April pakai prakiraan itu dari kondisi pertanaman vegetatif yang hijau tapi sudah umur 50 hari, 60 hari itu untuk memprediksi Maret, April. Sedangkan untuk melihat Mei sehingga kami punya data sampai Mei itu angka prakiraan atau potensi tadi itu dari vegetatif yang masih hijau umur 10 hari sampai 40 hari begitu, itu vegetatif itu nanti akan dipanen bulan April, Mei. Jadi itu masih prakiraan jadi angka perkiraan nanti setiap bulan dirilis, Bapak, itu berubah naik turun karena pergeseran waktu, pergeseran varietas, pergeseran apa itu angkanya bisa fluktuasi sebelum angka tetap, Bapak. Jadi kalau zaman dulu dikenal metode pakai yang lama itu *eye estimate* itu dikenal Aram I, Aram II, angka ramalan I, angka ramalan II, ramalan III, angka sementara, angka tetap. Sekarang cuma angka dua jenis, Bapak.

Di BPS angka KSA itu angka tetap dan angka apa ini potensi saja tapi potensi itu kalau sudah berjalan waktu misalnya nanti tanggal 21 April itu berarti bulan Maret yang lalu sudah angka tetap luas panennya baru luas panen, Bapak. *Nah*, itu baru menghitung luasan yang panen. *Nah*, untuk menghitung produktivitas karena ini prosesnya berjalan sehingga pakai angka produktivitas yang lama nanti akan diterbitkan angka produktivitas yang baru, selesai baru menjadi angka tetap sehingga untuk menghitung produksi setahun 2022 yang lalu, itu angka tetap baik produksi produktivitas metode ubinan itu diumumkan pada tanggal 1 Maret kemarin, itu final tapi angka-angka sebelumnya masih angka sementara.

*Nah*, dari angka itu ketemu, Bapak, memang 2022, Pak Andi Akmal, tadi tanya produksinya berapa 2022. Angkanya BPS luas panennya 10,45 juta hektar, keluar berasnya 31,54 itu yang angka terakhir itu dan setiap tahun juga begitu di data misalnya tahun 2021 itu 31 koma untuk berasnya 31,36 dan seterusnya, Bapak Ketua jadi izin. *Nah*, bagaimana pengertian *kok* surplus-surplus terus setiap tahun. Betul surplus itu rumus KSA BPS ini dengan perhitungan berapa diproduksi setahun, berapa dikurangi konsumsi setahun ketemunya selisihnya surplus. *Nah*, begitu Bapak yang dapat kami sampaikan sehingga untuk mengklarifikasi sehingga kemarin ada *statement* di koran yang ditayangkan di sini itu produksi bulan Februari turun 800.000 ton. Itu ternyata salah membaca menganalisis tabel KSA BPS ini, yang benar adalah itu tidak turun karena membandingkan angka sementara yang diprediksi lebih tinggi dibandingkan angka tetap Februari yang memang itu tetapi yang benar adalah dibandingkan kalau angka tetap dibandingkan angka tetap tahun lalu *dong* jadi naik.

*Nah*, kenapa *kok* bisa angka sementara diprediksi tinggi, angka tetapnya lebih rendah karena panennya Februari itu meluncur ke Maret sehingga diprediksi angka Maret lebih tinggi. Jadi berjalan terus, Bapak, dinamis *moving* antar bulan itu bisa terjadi sehingga kalau membandingkan supaya *apple to apple* ya bulan Maret tahun ini dibanding eh bulan Februari yang angka tetap tahun ini dibanding Februari tahun lalu, Januari tahun ini dibanding tahun lalu. Kumulatif Januari, Februari tahun ini dibanding tahun lalu dan angkanya memang lebih tinggi kondisi dua bulan pertama ini, Bapak Ketua. Itu angka BPS semua, kami satu data itu.

Demikian yang dapat kami laporkan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Luar biasa. Wandi ini lebih pintar daripada Kepala BPS kalau menerangkan ya. Kita lihat saja nanti. Tadi kan dikatakan bulan Maret, Februari nanti dilihatnya tanggal 20 Maret ya kan dirilis oleh BPS. Anda itu hitung *enggak* banjir di situ, coba hitung ada *enggak* 50 kabupaten kota di Indonesia banjir pada bulan Februari. *Enggak* ada kan Anda menjelaskan tadi.

#### **DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Maaf, Pak, saya tambahkan.

**KETUA RAPAT:**

*Enggak*, tadi kan *enggak* ada kan. Itulah saya pertanyakan lagi kan, baru Anda mau menjawab kan.

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Siap, kalau diperkenakan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan.

Jangan Anda itu yang enak-enak, *wah* ini prediksi sekian, ini sekian, ini sekian, 13 juta ton bla bla bla tapi Anda tidak memikirkan hampir 50 kabupaten kota itu banjir dan gagal panen, coba hitung.

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ini pakai angka yang BPS dirilis terakhir itu bulan Februari angka namanya judulnya potensi gagal panen 9 ribu hektar, Bapak. Jadi memang benar ada banjir, ada gagal panen, ada busuk betul, ada yang terkena juga ada. Bulan Januari 22.000 hektar. *Nah*, kami juga menghitung mendata totalnya 33.000 ribu hektar begitu, Bapak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kalau *enggak* saya tanya juga Anda *enggak* laporkan, seolah-olah *wah* landai-landai saja. Ya, kita lihat saja nanti ya Januari, Februari, Maret, April panennya hampir 13 juta ton. Nanti pada tanggal 20 Mei ya *toh*, tadi kan 20 hari setelah panen bulan berikutnya berarti tanggal 20 Mei, kita mau tahu ada *enggak* jumlahnya. Kalau *enggak* ada berarti data Anda kan tidak valid. Bicara surplus-surplus, perlu saya ingatkan lagi 2017 Anda Pusdatin. Anda membuat 7 juta ton, impor 2 juta ton lebih, perlu saya buka lagi.

Lanjut, Pak Sekjen.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak Ketua.

Dirjen BUN.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak Sekjen.

Izin Pak Ketua.

Bapak-Ibu Anggota Komisi IV,

Izinkan kami untuk memberikan penjelasan beberapa pertanyaan dari Anggota.

Yang pertama terkait pertanyaan Pak Ansi Lema terkait bahwa program peremajaan menjadi suatu hal yang menjadi harus untuk ke di Direktorat Jenderal Perkebunan. Hasil kajian yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Perkebunan dari seluruh lahan perkebunan kita 3... 20 sampai 30% hari ini itu sudah ada tanaman rusak, Pak dan tidak produktif yang harus segera dilakukan peremajaan. Dari 29 juta lahan kita, ada sekitar 1,8 juta yang harus hari ini, Pak, harus kita remajakan. Setelah kita menarik kita coba lihat contohnya di kelapa, kelapa dalam lah itu sekitar 400.000 hari ini harus segera diremajakan. Berapa kebutuhan benihnya, itu hitungan kita sekitar 40 juta batang. Kalau kita konversikan ke angka rupiah itu 3 triliun. Hari ini anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkebunan itu adalah 1,1 triliun.

Dari kalau dari 1,8 juta tadi yang kita hitung rusak itu kebutuhan anggarannya 16,2 triliun apa yang sudah dilakukan oleh Direktur Jenderal perkebunan dalam 3 tahun terakhir ini di mana kita sudah membangun beberapa *nursery* di berbagai lokasi dan tahun ini mudah-mudahan 47 *nursery* segera sudah terbangun. Di Batang yang hal yang menggembirakan sudah bisa diproduksi sampai 1 sampai 2 juta batang kelapa per tahun dan tahun ini mudah-mudahan *nursery* modern kita yang ada di Cianjur untuk kopi mudah-mudahan bisa produksi sampai 4 juta batang.

*Nah*, dari anggaran yang tersedia, tahun ini kita tidak lebih dari 17 juta batang yang bisa kita siapkan dari berbagai komoditas tadi ada sagu ada kakao dan lain sebagainya. Memang ini tidak me... apa namanya tidak... tidak cukup untuk kita melakukan dalam beberapa tahun ke depan untuk mengganti tanaman kita yang sekitar 16,2 triliun tadi. Dari itu teman-teman di Direktorat Jenderal Perkebunan terus melakukan upaya. Kita ada Undang-Undang Perkebunan, kita coba melihat Pasal 57, ada kemitraan usaha perkebunan. Hari ini kami di Direktorat Jenderal Perkebunan lagi mendorong program bank benih perkebunan yang kami singkat Bank Benih Perkebunan.

Sudah dua putaran, kami melakukan pertemuan dengan *private* sektor yang harus memberi kewajiban di undang-undang terkait perkebunan. Aturannya sedang kami atur, Pak, jadi ide awalnya misalnya 1% saja dari kapasitas perbenihan yang dikelola oleh perkebunan swasta itu disumbangkan pada Bank Benih Perkebunan. portalnya lagi kami platform-nya lagi kami bangun. Mudah-mudahan dari 1% hampir semua ini perusahaan-perusahaan perkebunan swasta sudah sudah oke, Pak, untuk menyumbangkan 1% kapasitas benihnya per tahun untuk kita kelola secara gratis dan kita akan distribusikan secara gratis kepada masyarakat dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, Pak, kami juga sudah bertemu dengan Pak Deputi Pencegahan KPK untuk meminta *corruption risk analysis*-nya terkait dengan kebijakan ini dan mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau mengeluarkan *review* terhadap upaya kita dari Bank Benih Perkebunan.

Yang kedua, di Pasal 57 Undang-Undang Perkebunan ada pasal yang mewajibkan para pekebun para perkebunan swasta itu untuk memfasilitasi terbangunnya kebun masyarakat 20% dari yang dikuasai. *Nah*, ini yang akan kita

dorong, Pak. Kami sudah berkoordinasi dengan Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian untuk terus mendorong terbentuknya Badan Pengelola Dana Perkebunan selain BPDPKS yang hari ini sudah berjalan. Mudah-mudahan dari segala usaha kita ini Pak Andi, kami mohon doanya. Kalau memang dibutuhkan diskusi dengan teman-teman Bapak-Bapak dari Komisi IV kami siap untuk diberi masukan. Mudah-mudahan ini kita bisa menghimpun, Pak, puluhan juta benih tiap tahunnya. Jadi misalnya karena sawit sudah terpenuhi misalnya karena sudah ada BPDPKS, jadi kalau ada perbenihan terkait dengan sawit dia akan mengkonversikan pak nanti apakah kebutuhan kita kelapa atau kakao.

*Nah*, disinilah akan tumbuh dia akan melakukan KSO dengan penangkar-penangkar mandiri kita. Dia akan meng-KSO-kan ke sana karena penangkar-penangkar apa perbenihan swasta tadi tidak mampu untuk menyediakan kelapa atau kakao nanti akan di-KSO-kan dalam aturan yang sedang kita susun, Pak. Jadi ini juga akan menggairahkan apa namanya kembali penangkar-penangkar mandiri kita yang ada di daerah, Pak yang hari ini mulai juga agak mati karena kita tidak beri fasilitas dan lain sebagainya. Sekarang sudah kami semua ini, Pak, sudah kami akreditasi namanya ya Pak Direktur ya kemarin, sudah sertifikasi penangkar-penangkar kita supaya benih yang dihasilkan itu semua kita jamin bersertifikat.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Pak Andi mohon maaf, itu mohon untuk dipaparkan lebih detail tentang alurnya ini maksudnya seperti apa. Silakan supaya, kan ini belum ya baru mau akan didesain ya kira-kira...

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Saat ini lagi pembentukan, Pak.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Ya, rencananya seperti apa.

Silakan.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Jadi mungkin hari ini kita bisa belum bisa ini pak ya tapi beberapa kali putaran dengan *private* sektor sudah kita lakukan dan sudah ada lampu hijau, Pak, yang diberikan ke kita karena memang di dalam Undang-Undang Perkebunan disebutkan bahwa untuk membangun keberlanjutan perkebunan itu, anggarannya dananya itu bukan hanya APBN boleh CSA boleh juga investasi. Jadi sekarang kita mendorong CSA dan investasi itu, Pak, tapi kalau yang tadi terkait dengan kewajiban 20% oleh yang harus disiapkan oleh perusahaan perkebunan itu akan kita dorong, Pak, bagaimana terbentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan sehingga ke depan kita tidak lagi, perkebunan ini tidak lagi ini dengan APBN tidak sangat tergantung pada APBN karena yang posisi yang kita hadapi hari ini, Pak, 20 sampai 30%, tanaman

kita rusak dan kita tidak punya kemampuan anggaran untuk mengganti tadi itu apa yang diberi masukan oleh Bapak-Ibu sekalian selama ini untuk membangun *nursery* itu hanya 10-20% yang bisa kita lakukan. Kita lihat hari ini kan kakao kita sudah luasannya sangat kecil terus kelapa kita hampir di semua pesisir itu pesisir pantai sudah tidak ada usaha untuk peremajaan. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini dengan mendorong Babe BUN dan pada saatnya Permentan terkait Babe BUN sudah keluar nanti kami bisa menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian.

Terus yang terkait dengan apa tadi sagu tahun 2022 dan 2023 ini dukungan anggaran untuk penataan sagu masing-masing 900 hektar, Pak, karena itu tadi keterbatasan anggaran, Pak, karena kita bagi-bagi karena kemampuan kita memang ya hanya bisa menyiapkan benih 17 juta pada tahun ini sehingga telah terlaksana 1.800 hektar yang diharapkan dapat menghasilkan sekitar 5.400 ton kebun sagu sampai akhir 2023 ini. Lokasinya Meranti, Sorong, Sorong Selatan, Jayapura, Nabire, Mimika, Mappi, Keerom, Kepulauan Yapen dan Waropen, Pak. Terus terkait tadi dengan desa organik, kami melakukan sebenarnya ini untuk menghadapi ekspor. Kami melakukan pembinaan mulai dari hulu sampai hilir sampai pendampingan sertifikasi bisa organik SNI maupun organik Uni Eropa.

Mungkin itu, Pak yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Sekedar masukan saja Saudara Dirjen. Anda punya Balit Palma di Sulawesi Utara tapi kata gubernur tidak ada manfaatnya untuk daerah katanya. Tidak ada manfaat untuk daerah karena di sana potensi akan datang ya kelapa dalam itu akan jauh merosot karena kelapanya dipetik, pohonnya sudah tua, sudah tidak produktif, ditebang dijadikan rumah kayu. Sementara Anda punya Balit Palma di sana. Kenapa *enggak* yang ketempatan wilayahnya itu diberikan prioritas karena kan dia ketempatan di sana ya.

Lanjut Sekjen, siapa lagi.

#### **SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak.  
Dirjen Peternakan.

#### **DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak Sekjen.

Izin, Pak Ketua, Pimpinan dan Anggota.

Hanya beberapa saja yang lain *Insyah Allah*, saya akan jawab secara tertulis. Pertama kaitan Pak Ansi yang apa namanya apresiasi buat NTT. Saya kira bisa, Pak, nanti karena kebetulan di tempat kami untuk sarana prasarana tetap juga kami akan minta ke PSP untuk diadakan kayak pengolahan pakan segala seperti itu dan untuk

rabies itu di NTT juga sudah kita anggarkan Pak Ansi kurang lebih 525 juta atau senilai atau 15.000 dosis, Pak. Jadi memang Pak Ansi kendalanya sekarang bukan hanya di NTT di seluruh Indonesia yang ada endemi rabies itu adalah banyaknya anjing liar. Ini yang paling susah untuk dilakukan.

Kalau anjing yang punya pemilik itu rata-rata sudah divaksin. Ini yang liar ini entah kapan datang, kapan pergi ini sulit untuk dilakukan oleh petugas. Makanya doakan, Pak Ansi, ini lagi kami coba bersama dengan pihak Project KSAP untuk membuat yang oral. Ini disimpan nanti dia akan datang makan. Jadi kapan saja dia makan itu dia tertarik, dia makan dia pergi juga dia tetap sudah tervaksin. Itu lagi dicoba sekarang uji efektivitasnya seperti apa dan dari situ Pak Ansi kalau memang masih ada kekurangan lagi jumlah 15.000 dosis, kita mungkin didorong petugas untuk bisa dilakukan percepatan vaksinasinya, Pak, karena memang agak repot karena harus tangkap vaksin sendiri begitu ya yang liar ini yang susah, Pak. Mohon dibantu untuk disosialisasikan biar lebih ini lagi.

Kemudian Pak Khalid ya kaitan dengan desa korporasi, Pak, sejak tahun terakhir tahun 2021, Pak. Ini 2022, 2023 *enggak* ada.

**F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):**

Tahun 2022 *enggak* ada?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

*Enggak* ada, Pak.

**F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):**

Yang bagi-bagi kemarin itu say abaca berita itu tahun ... 250 ekor sapi tahun berapa itu?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Itu program 2021, Pak.

**F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):**

Tahun 2021 baru direalisasikan sekarang?

**KETUA RAPAT:**

Begini tadi Anda ini ada saksi ini, 2.000... tahun 2020 betul Pak Sekjen gagal lelang, betul? Diundur 2021, gagal lelang, kemudian diadakan 2022 betul? waktu di atas, sekarang beda lagi jawabnya kan.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Izin, Pak ketua.

Jadi gagal itu adalah luncuran jadi ada ada pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan 50 hari setelah 31 Desember. Ini yang diselesaikan di tahun 2022 tapi itu adalah program tahun 2021.

**KETUA RAPAT:**

Pak Sekjen tadi dengar *enggak* program tahun berapa tadi yang dikatakan tadi. *Enggak, enggak* saya maunya jujur. Tadi 2020 kan Wandi, dengar? Anggaran tahun 2020 gagal lelang, betul? Dialihkan 2021 tidak berjalan, dianggarkan 2022. Tadi Anda ngomong begitu *loh* di atas *loh*.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ini data terakhir, Pak, yang kami dapat.

**KETUA RAPAT:**

Bukan, tadi Anda ngomong seperti apa. Jangan bicara data dulu dengan saya. Tadi Anda mengatakan yang diaminin oleh beliau-beliau ini ada perkebunan, ada karantina, ada PSP. Anda mengatakan 2020 gagal lelang mundur 2021, 2021, 2022 tadi Anda mengatakan 2021 gagal jadi Desember dimundurkan 50 hari. Saya bagaimana mau ngomong lagi. Terserah Pak Khalid *deh* mau ngomong apa *deh*.

**F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):**

*Enggak*, begini Pak Ketua tadi penjelasan Pak Ketua ke saya beda dengan ini, ini mohon maaf. Program ini, ini uang negara. Okelah kalau Pimpinan cuma dapat kami juga Anggota harus juga tahu. Jadi Bapak jelaskan ke saya beda, beliau jelaskan ke saya beda. Yang mana yang benar itu, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Coba berapa wilayah yang dapat.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Saya bacakan, Pak. Program mulai tahun 2020 kita namakan program korporasi desa sapi. Untuk 2020 ada 5 lokasi: Lampung Selatan, Lombok Tengah, Probolinggo, Gowa dan Ngada.

**KETUARAPAT:**

Lampung Selatan diberikan kepada siapa? Anda lapor saya *enggak*, saya tahu *enggak*.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Setahu saya waktu itu pernah saya komunikasikan, Pak Ketua.



**KETUA RAPAT:**

Anda tidak pernah komunikasikan ke saya. Anda tadi mengatakan 2020 gagal.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Pimpinan.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ada Lampung Selatan ada, Pak.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Pimpinan, mohon maaf, Pimpinan.

Pertama waktu, kemudian saya *enggak* senang bicara begini *nih*. *Enggak*, saya *enggak* senang. Pertama kita saling mengklarifikasi sesuatu yang sebenarnya sudahlah.

**KETUA RAPAT:**

*Enggak, enggak*, saya punya hak untuk bicara, saya, Pimpinan, di sini.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Ya, kami juga Anggota, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan. Saya bicara dulu. Anda tidak pernah mengatakan ada di Lampung Selatan.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

2020, Pak Ketua, Lampung Selatan ada.

**KETUA RAPAT:**

Anda tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa di Lampung Selatan ada seribu karena waktu itu kami menolak. Kami menolak ya. Kami menolak. Tahu-tahu 2022 ada lagi wilayah mana. Aceh?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

2021, Aceh.

**KETUA RAPAT:**

Siapa? Ada Pak Khalid atau Pak Salim?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ini Aceh Besar, Pak.

**F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):**

Siapa penerima, Pak?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Itu berdasarkan usulan dari dinas, Pak.

**F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):**

Maaf, Pak, kemarin waktu itu bukan dinas cuma *enggak* enak saya buka di ruangan ini.

**KETUA RAPAT:**

Buka saja *enggak* apa-apa.

**F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):**

Kemarin saya sampaikan ingat waktu berdiri di situ, Pak. Saya dengar Aceh ada Pak Salim Fakhry tahu, *enggak* tahu, Pak. Saya tanya Salim Fakhry kan beliau *enggak* tahu. Saya bilang *enggak* boleh begitu, Pak, tolong hargai yang lebih mengerti kondisi Aceh, kami. Tolong hargai kami. Oke, *enggak* terealisasi, tiba-tiba muncul, Pak. Maka begitu Pak Sudin tadi pagi sampaikan ini perlu klarifikasi kenapa ketua diam-diam kemarin banting-banting meja di sini *enggak* setuju. Begitu ini terealisasi setuju, apa Ketua sudah dapat. Ini saya tanya langsung, Ketua, kemarin.

Terima kasih.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya, kami akan berikan datanya, Pak.

**KETUA RAPAT:**

*Enggak* punya data?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Nama kelompoknya, Pak, *enggak*.

**KETUA RAPAT:**

*Enggak* punya?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya, nama kabupatennya ada.

**KETUA RAPAT:**

Ada berapa orang staf Anda di belakang?

**DIRJEN PKH KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Satu, Pak.

**KETUA RAPAT:**

*Enggak* punya data? Bagaimana datanya ...

**F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):**

Ini mohon maaf, Pak Ketua. Saya khusus menyangkut dengan sapi yang di Aceh ini curiga saya. Masa' kami Anggota *enggak* tahu. Saya minta data ini, kita mau turun. Saya juga besok mau pulang, mau cek.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Baik, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ada lagi, Pak Sekjen?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Dirjen PSP.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak Sekjen.

Izin Pak Ketua. Sedikit saja, Pak, yang tadi terkait dengan Pak Hermanto, Pak ya itu yang terkait dengan bengkel Alsintan tadi, Pak Ketua. Jadi kemarin Pak Ketua sesuai dengan arahnya, Pak Ketua, kami sudah memanggil seluruh penyedia-penyedia Alsintan, Pak, kemarin dan sudah ada kesepakatan bahwa ke depan mereka akan membangun juga bengkel-bengkel Alsintan untuk *after sales service*-nya itu, itu dikontrak kita dengan mereka itu, itu sudah ada.

Terus kemudian yang bengkel Alsintan di program kita, walaupun itu terbatas memang itu sudah ada kita siapkan, Pak. Mudah-mudahan itu bisa nanti penyediannya karena kemarin sempat hilang di *e-katalog* yang roda empat, Ketua, sehingga ada yang muncul roda tiga. Saya sampaikan ke direktur bahwa kalau roda tiga ini terbatas kalau dia letaknya misalnya di provinsi. Jadi nanti coba monitor yang dulu itu ada

keluar di *e-katalog* roda empat, itu keluar lagi mudah-mudahan bisa mereka siapkan barangnya sesuai dengan yang akan kita minta, Pak Ketua. Jadi ini bengkel Alsintan tetap ada.

Terus kemudian yang tadi ada Pak Khalid, Pak, izin, Pak yang terkait dengan asuransi, asuransi AUTP ya, Pak ya, AUTP dan AUTSK terutamanya AUTP itu tetap ada. Namun, jumlahnya berkurang karena menurut data kami dua tahun ini dan kami bolak-balik mohon maaf ini, Pak Ketua, memang ini kan preminya 20% itu kan dari petani, Pak, 80% kita bayarkan dari Kementan. *Nah*, itu dari petani itu sangat sulit membayar 20%-nya itu, Pak, 36.000 itu. *Nah*, kami bersurat saya kira paling tidak tiga kali sudah saya bersurat bahwa ke Pak Menteri, ke para gubernur, bupati supaya minta tolong bantuan APBD II atau APBD I.

*Nah*, akhirnya itu semuanya juga dua tahun ini menurun. Padahal, kita rencanakan satu juta itu berkurang sehingga hari ini yang sudah masuk dari dinas itu sekitar 260-an ribu dan kita genapkan sekarang sekitar 300 ribuan, Pak Ketua, atau Pak Khalid, Pak, tapi itu ada anggaran yang AA di situ nanti manakala itu ada dari daerah, Pak, Pak Sekjen izin, kami juga sudah sampaikan ke Pak Menteri bahwa itu nanti akan kita minta supaya dibuka AA-nya, Pak untuk yang asuransi itu, Pak. Saya kira itu pak strategi yang kita lakukan.

Terima kasih, Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi Pak Ali Jamil, saya tanya, petani membayar 36.000 asuransi pertanian per sekali tanam, keberatan tapi mereka beli rokok satu hari 30.000 tidak keberatan. Ya, kita harus ngomong jujur ini iya kan. Ini kan kita *tuh* harus memberikan pelajaran yang baik kepada petani. Pemerintah sudah baik, Kementerian Pertanian sudah baik memberikan subsidi yang demikian besar. Persoalannya adalah hampir rata-rata di dinas itu sebagian besar tidak paham. Coba nanti, Pak Ali Jamil kalau ke Lampung tanya saja petani, kalau kamu bayar asuransi pertanian ke mana, jawabannya *enggak* tahu. Petugasnya di sebagian besar di dinas juga *kagak* tahu, bukan mereka tidak mau tidak mau bayar, *enggak*, 36.000 itu kalau dibagi ya cuman berapa sih satu dibagi 100 hari *deh* dari 36.000 ya kan. Ini kan nilai yang tidak seberapa begitu *loh*.

Kemudian tadi masalah bengkel Alsintan, saya ingatkan kembali. Setiap penyedia harus punya perwakilan untuk *after sales service*. Jangan semua dibebankan APBN *dong*, sudah APBN-nya kecil dibebankan suruh mobil keliling-keliling, mereka sementara mereka untung seenak-enaknya ya.

#### **F-P..... (.....):**

Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Ada lagi Sekjen?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya, terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Cukup? Ya, kan maka saya tanya cukup belum. Ya, dari diskusi, masukan, catatan, lain-lain ya, sebelum kita menghadiri rapat dengar pendapat sore ini, saya persilakan Ibu Doktor Ketua.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Jangan lupa pakai doktor ya.

**KETUA RAPAT:**

Doktor membacakan kesimpulan rapat sore ini. Silakan Ibu Doktor.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Jangan lupa pakai doktor ya, sekolahnya susah.

Terima kasih, Kakak.

Baik.

Bapak-Ibu,

Setelah rapat dengan begitu hebatnya tapi yang jelas Bapak-Bapak Dirjen, Pak Sekjen namanya juga mitra kalau ngomong saya begini tadi yang kencang-kencang sudah. Jadi saya ngomongnya pelan-pelan saja itu yang paling. Jadi, iya memang senyum itu bahagia. Jadi kalau ada program namanya juga kita ini wakil rakyat dipilih oleh rakyat dan disumpah. Oleh karena itu, ya kalau ada program paling tidak ya *kulon nuwun* lah sama yang pemangku Dapil itu. Jangan sampai kemudian program yang di Aceh, mana Pak TA Khalid ya *enggak* tahu sama sekali. Ini kayaknya sudah berkali-kali ya, berkali-kali Pak Sekjen jadi yang namanya mitra ya jangan begitu lah, itu.

Lalu kemudian yang lain mengingatkan kemarin, Ketua, saya melaporkan ketika kita rapat dengan Bapanas, kita akan bicara tentang data. Data boleh tidak percaya atau boleh tidak, boleh percaya atau tidak tetapi dari data itulah kemudian kita menentukan intervensi program kita dari data itu. Oleh karena itu, kemarin, Ketua, kita sepakat untuk bicara tentang data itu dengan Bapanas, BPS, BPS bukan mitra kita tapi nanti kita undang. Tentu dengan teman-teman dari Kementerian Pertanian. Ketika kita bicara tentang impor kemarin waktu di Bapanas dan itu menjadi salah satu poin kesimpulan kita. Nanti kita jadwalkan mungkin setelah lebaran ya waktunya sudah *enggak* ada lagi. Kita akan masuk ke kesimpulan rapat kita kali ini. Memang betul, betul saya tidak sabar untuk buka puasa bersama Ketua yang sudah disiapkan. Sudah setuju semua?

Baik.

Saya bacakan karena ini aturannya harus dibacakan.

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian mengenai rincian rencana dan program kerja Kementerian Pertanian tahun 2023 pasca rapat kerja tanggal 27 Maret 2023 dengan fokus kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian dan peternakan yang didukung dengan penguatan sarana prasarana pertanian, pengembangan perbenihan hingga penguatan SDM pertanian. Komisi IV DPR RI memberikan beberapa catatan diantaranya:
  - a. Perlunya menciptakan standar benih berkualitas dengan harga terjangkau;
  - b. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi PMK dinilai masih belum optimal dan perlunya sosialisasi mengenai penggunaan atau pemanfaatan *ear tag* pada ternak sapi;
  - c. Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pemupukan;
  - d. Perlu evaluasi...

**F-PG (ALIEN MUS):**

Pimpinan, maaf.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Silakan.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Ini poin b ini pelaksanaan kegiatan vaksinasi PMK dinilai masih belum optimal, itu sendiri jangan digabung dengan sosialisasi mengenai penggunaan pemanfaatan *ear tag* karena itu dua dua masalah yang berbeda.

Itu saja, Ketua Pimpinan.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Ya, dibagi saja tapi sepakat ya.

**KETUA RAPAT:**

Itu bukannya masih, tapi belum optimal.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Oke.

- e. Perlu evaluasi kegiatan upaya perlindungan tanaman pangan dari hama penyakit maupun organisme pengganggu tanaman;
- f. Mempertanyakan terkait peningkatan anggaran PENAS dan kegiatan pelaksanaan kegiatan petani magang;
- g. Kementerian Pertanian harus menyusun program kerja dalam rangka melakukan regenerasi kebun milik rakyat serta penyiapan kebun-kebun sumber bibit.

Para Anggota?

**F-P..... (.....):**

Izin. Ke atas dulu karena peternakan masuk dalam pertanian menurut saya dan peternakan itu tidak perlu lagi. Nilai tambah komoditas pertanian, itu saja.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Oh, peternakannya dihapus.

**F-P..... (.....):**

Ya, dan peternakannya dihapus.  
Setuju, setuju.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Ya.

**(KETUK PALU 1 KALI)  
(RAPAT:SETUJU)**

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan ber... ini kegiatannya dua ya, kegiatan-kegiatan atau satu saja. Oh dua ya. Kegiatan-kegiatan berdasarkan masukan dan catatan yang disampaikan pada rapat hari ini. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar seluruh rincian rencana dan program kerja yang sudah disetujui tidak mengalami perubahan selain melalui mekanisme rapat kerja maupun rapat dengar pendapat.

Para Anggota?

**(KETUK PALU 1 KALI)  
(RAPAT:SETUJU)**

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar menyerahkan data potensi lahan eksisting di masing-masing unit pelaksana teknis atau satuan kerja milik Badan Standarisasi Instrumen Pertanian dan Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian baik yang sudah dimanfaatkan sebagai

kebun percobaan maupun sebagai pertanian komersil. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar data tersebut diserahkan dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah rapat dengar pendapat hari ini.

Para Anggota?  
Para Anggota, setuju?

**(KETUK PALU 1 KALI)**  
**(RAPAT:SETUJU)**

**F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):**

Ibu... Ibu Ketua, izin.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Silakan, Eyang.

**F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):**

Tadi kan Ibu Ketua menyarankan untuk menghubungi yang ada di Dapil. *Nah*, ini kan belum ada di kesimpulan.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Oh, untuk *kulon nuwun* tadi? Ya itu, Ketua, kalau semua program yang disampaikan ke Dapil, pemangku Dapil itu harus tahu, dikomunikasikan dengan pemangku Dapil. Itu sudah sering ya kita sudah sering, itu sudah sering *sih* sudah masuk dalam poin-poin kesimpulan sudah beberapa kali, eyang.

Poin 4... makanya tadi saya mengingatkan karena itu komitmen kita bersama-sama.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data stok beras hasil panen di penggilingan seluruh wilayah Indonesia dan selanjutnya diserahkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya akhir Mei 2023.

Para Anggota?  
Pak Sekjen?

**KETUA RAPAT:**

Jadi ini maksudnya begini tadi Wandu mengatakan, Januari, April potensi produksi hampir 13 juta ton. Anda mengatakan 20 hari ini saya kasih waktu 30 hari, paham? Setuju?



**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Setuju, Pak.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

**(KETUK PALU 1 KALI)  
(RAPAT:SETUJU)**

**PEMERINTAH:**

Izin.

Bu Ketua boleh, boleh, Pak, yang tadi izin Pak Sekjen yang tadi yang terkait dengan KP3 itu, Pak yang dengan teman-teman PI tadi, arahnya Pak Ketua tadi boleh *enggak* kita masukkan itu, Pak?

**KETUA RAPAT:**

Masukkan.

Komisi IV meminta agar Pupuk Indonesia Holding Company turut membantu pembiayaan KP3, masukkan. Menyalahi aturan *enggak*, untuk mengarahkan kan? Oke.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Pak Ketua, usul soal Irjen tadi. *Loh* yang tadi saya ngomong substansinya panjang lebar, hipotesis saya awalnya tadi. Optimalisasi peran Irjen untuk melakukan kontrol internal.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Ya, saya setuju dimasukkan.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Kalau diizinkan kita paparan, Pak atau saya sedang membukukan, Pak, kalau nanti saya akan serahkan kepada Pimpinan nanti sebagai catatan untuk pendalaman.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Di draf kesimpulan ya, oke. Untuk poin 5 ya tadi poin 4 sudah.

5. Komisi IV DPR RI... mohon diperhatikan Bapak-Ibu Anggota. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Sekretariat Jenderal untuk melakukan optimalisasi pengawasan internal Kementerian Pertanian.

Para Anggota?  
Kakak Ansi?  
Pak Sekjen?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Jika diperkenankan kalau kita *state* melakukan itu sudah kerjaan rutinnnya mungkin yang di *state* di sini meningkatkan, nah begitu.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Oke, meningkatkan ya. Meningkatkan optimalisasi, benar optimalisasi ya?  
Setuju Pak Sekjen?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Setuju.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

**(KETUK PALU 1 KALI)  
(RAPAT:SETUJU)**

Poin enam, yang tadi belum.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Izin, Pak Pimpinan, Pak, Bapak-Ibu para Anggota karena PI kan tidak ikut rapat ini konteksnya dirubah begini bagaimana, jadi yang Bapak minta adalah ke Kementerian Pertanian maka konteksnya Kementerian Pertanian yang mengkoordinasikan kepada itu. Jadi kita *enggak* salah, orangnya *enggak* ada tahu-tahu diperintah kan *enggak* enak. Ya terima kasih...Kementerian.

**F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):**

Ketua usul, pembiayaannya *tuh* pembiayaan apa harus jelas itu.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Mungkin pembiayaan Operasionalisasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida/KP3, KP3.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Baik.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia terkait pembiayaan operasionalisasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

Para Anggota?  
Pak Sekjen?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Setuju.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

**(KETUK PALU 1 KALI)  
(RAPAT:SETUJU)**

**KETUA RAPAT:**

Demikian rancangan kesimpulan rapat dan kita bersama-sama menyetujui kesimpulan rapat dengar pendapat hari ini.

**(KETUK PALU 1 KALI)  
(RAPAT:SETUJU)**

Sebelum kami menutup rapat dengar pendapat hari ini, kami persilakan saudara Sekjen untuk menyampaikan kata penutup singkat, jelas.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama, kami sampaikan terima kasih atas arahan, masukan, bimbingan kepada kami semua untuk memperbaiki perencanaan dan implementasi program. Yang kedua, kami mohon maaf apabila dalam diskusi dalam menyampaikan pandangan ada yang tidak berkenan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Sebelum saya menutup rapat hari ini, tadi dikatakan Lampung Selatan mendapat bantuan 1.000 sapi. Saya minta Anda besok menyerahkan data, data detail. Siapa yang mengusulkan, siapa yang menerima, nama kelompok, nama seluruh anggota, nama dusun, desa dan kecamatan akan saya usut karena hal itu pun pernah terjadi di tempatnya Pak Ali Jamil. Dibangun tiga embung, dibilang Komisi IV. Nyatanya saya tidak tahu, betul Pak Ali Jamil? Saya tidak tahu sama sekali ada tiga usulan dan sudah dibuat bawa-bawa nama saya maka saya minta paling lambat

besok datanya detil ada di meja saya. Ya Anda minta sendiri *dong*. Oh begitu ya jadi Lampung dan Aceh besok datanya sudah harus ada di Setkom diserahkan.

Terima kasih.

Dengan berakhir sudah rapat dengar pendapat pada hari ini.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, rapat dengar pendapat ini kami tutup.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(KETUK PALU 3 KALI)  
(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.37 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

**Drs. ACHMAD AGUS THOMY**  
**NIP. 196508171988031002**